

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2024



**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**



YUSTIN PATRIA PROMORDIA, S.T., M.Si.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami beserta pejabat dan staf di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat melaksanakan tugas-tugas hingga akhir tahun 2024.

Dengan ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini menyajikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V pada tahun 2024 sebagai dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan, serta berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2020-2024.

Laporan ini juga berisi tentang pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V terhadap tugas yang diemban berdasarkan tugas dan fungsi yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penyajian laporan ini telah diupayakan dengan semaksimal mungkin. Namun, kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Untuk itu, kami berlapang hati untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan terhadap Laporan Kinerja di masa mendatang.

Palembang, 17 Januari 2025

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Sumatera V



Yustin Patria Primordia, S.T., M.Si.

NIP. 19720626 199703 2 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja Balai secara akuntabel yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai wujud keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam ber-organisasi yang sistematis dan melembaga.

Adapun dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka secara berjenjang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menetapkan tujuan yaitu:

"Mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Wilayah Sumatera V"

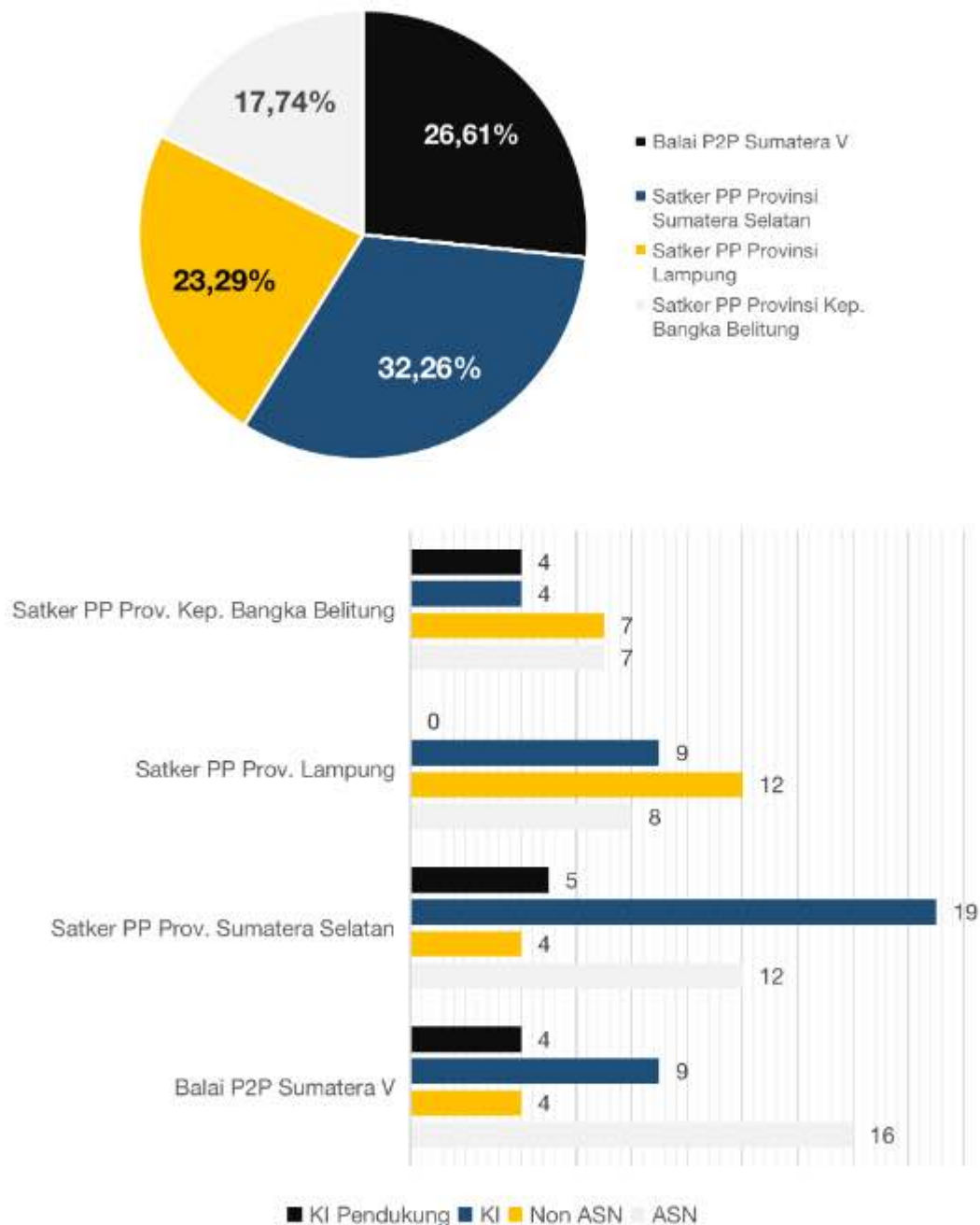
Tujuan ini dapat dicapai melalui penyelenggaraan sasaran-sasaran strategis bidang perumahan, diantaranya:

1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan bantuan PSU perumahan; dan
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V terus memaksimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan untuk dapat meraih hasil yang mendekati optimal pada tahun 2024. Adapun beberapa isu-isu strategis yang dihadapi Balai di tahun ini diantaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai yang menyebabkan beberapa orang harus mengerjakan pekerjaan di luar tugas pokok dan fungsinya;
2. Minimnya peran Balai sebagai mediator diantara stakeholders untuk melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan penyediaan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan banyak berperan dalam verifikasi, pengawasan dan pengendalian penyediaan perumahan;
3. Belum tersedianya basis data perumahan komprehensif yang mampu dijadikan acuan atau pedoman dalam menentukan strategi penyediaan perumahan yang tepat dan
4. Belum tersedianya anggaran/dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih bahkan ketidakcocokan dalam pendanaan dalam pengadaan perumahan.

Selama tahun 2024, terdapat jumlah total pegawai yang bekerja di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V adalah 124 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara Pusat, Non-Aparatur Sipil Negara, Konsultan Individual dan Konsultan Individual Pendukung.



Selain itu, dalam mendukung kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V pada tahun 2024, terdapat 263 sarana dan prasarana dengan nilai Rp. 1.142.428.000,-. Sarana dan prasarana ini terdiri dari peralatan kantor dan alat pengolah data (mesin).

PERENCANAAN KINERJA

Dalam mewujudkan kedua sasaran tersebut, dibuatlah indikator kinerja yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Renstra 2020-2024, indikator kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		UNIT	PK		RENSTRA 2020-2024
					Revisi Awal	Revisi Akhir	
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	4	3	12
		2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	3.650	8.318	19.890
		3	Jumlah Rumah Susun yang Dibangun	Unit	161	150	911
		4	Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara	Tower	3	2	28
		5	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	-	-	120
		6	Jumlah Rumah Khusus yang Dipelihara	Unit	-	-	-
		7	Jumlah Rumah Umum yang Mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU	Unit	900	675	5.552
		8	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Laporan	3	3	-
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	4
		2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	4	4	4
		3	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	4	4	4

Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan 14 kali revisi pada DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Berdasarkan DIPA Revisi Ke-14 tanggal 27 Desember 2024, anggaran total Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V adalah sebesar Rp. 5.775.217.000,-. Hingga akhir bulan Desember 2023, anggaran yang berhasil diserap adalah sebesar Rp. 5.463.570.000,- atau sekitar 94,60% dari target.

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V tahun 2024, terdapat 8 (delapan) kategori sasaran/output yang diharapkan dapat dicapai oleh balai di tahun ini. Berdasarkan kategori tersebut, capaian Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V adalah 99,92%. Sedangkan berdasarkan Renstra 2020-2024, capaian Balai mencapai 33,73% meningkat dari capaian pada tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja (PK) 2024			RENSTRA 2020-2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni							
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 Laporan	3 Laporan	100,00	12 Laporan	3 Laporan	25,00
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	8.318 Unit	8.278 Unit	99,52	19.890 Unit	8.278 Unit	41,62
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	150 Unit	150 Unit	100,00	911 Unit	150 Unit	16,47
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	2 Tower	2 Tower	100,00	28 Tower	2 Tower	7,14
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-	120 Unit	-	0,00
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-	-	-	0,00
7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	675 Unit	675 Unit	100,00	5.552 Unit	675 Unit	12,16
8.	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	3 Laporan	3 Laporan	100,00	-	3 Laporan	100,00
TOTAL				99,92			33,73
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan							
1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00	4 Layanan	1 Layanan	25,00
2.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	4 Layanan	100,00	4 Layanan	4 Layanan	100,00
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan	100,00	4 Layanan	4 Layanan	100,00
TOTAL				100,00			75,00

Pada tahun 2024, capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V belum mencapai nilai maksimal. Hal ini disebabkan beberapa hal seperti Kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan keterbatasan jumlah maupun kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).

Selama kurun waktu 2020-2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah melaksanakan kegiatan bidang perumahan dengan rincian sebagai berikut.

KEGIATAN	SATUAN	TAHUN					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	12	6	6	6	3	33
Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	847	619	2.293	675	4.434
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	17.545	7.220	12.332	10.035	8.278	55.410
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	6	34	1	-	-	41
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	-	16	-	16
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	64	320	261	119	150	914
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	4	1	6	2	2	15
Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	-	-	-	2	3	5
Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	4	4	1	1	11
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	3	4	4	4	4	19
Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3	4	4	4	4	19

Capaian pelaksanaan kegiatan oleh Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V disetiap tahunnya berbeda-beda yang disebabkan perencanaan program dan penganggaran yang disesuaikan dengan kondisi disetiap tahunnya.

Berdasarkan DIPA Revisi Ke-14 tanggal 27 Desember 2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki anggaran total sebesar Rp. 5.775.217.000,-. Hingga bulan Desember 2023, anggaran yang berhasil diserap oleh balai adalah sebesar Rp. 5.463.570.000,- atau sekitar 94,60% dari target.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOL	SATUAN	PAGU	REALISASI	KEUANGAN		FISIK	
				(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Penyediaan Akses Rumah Layak Huni									
1.	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan/Kajian		2.555.148	2.465.431	100,00	96,49	100,00	100,00
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan									
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan/Laporan/ Dokumen		2.961.239	2.822.411	100,00	95,31	100,00	100,00
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit/m2/Paket		258.830	175.728	100,00	67,89	100,00	100,00
TOTAL				5.775.217	5.463.570	100,00	94,60	100,00	100,00

Selama tahun anggaran 2024, capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V mencapai 99,92%. Beberapa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V tahun 2024, diantaranya:

1. Terlaksananya kegiatan peningkatan penyediaan rumah layak huni yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V diantaranya pembangunan dan pemeliharaan rumah susun, pembangunan fasilitas bantuan PSU serta pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko;
2. Terlaksananya kolaborasi antara stakeholder pada *Pilot Project* Pembangunan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) di Kota Prabumulih;
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V secara berkala baik melalui kunjungan langsung ke lapangan ataupun secara daring berkenaan dengan keterbatasan waktu dan anggaran serta jarak tempuh ke lokasi yang cukup jauh;
4. Koordinasi dengan berbagai *stakeholder* bidang perumahan terutama Pemerintah Daerah, pelaksana pembangunan, pengembang perumahan dan masyarakat selama pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perumahan; dan
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pada kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Capaian Output Tahun 2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, terdapat 1 (satu) kegiatan yang belum mencapai target berdasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan capaian 8.278 unit dari target sebanyak 8.318 unit dengan persentase 99,52%. Hal ini disebabkan oleh adanya karena pengunduran diri dari Penerima Bantuan pada kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga adanya pengembalian dana ke kas negara namun output telah terhitung. Selain itu terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, diantaranya:

1. Minimnya koordinasi dengan *stakeholder* diluar bidang perumahan yang juga dapat membantu pelaksanaan kegiatan bidang perumahan seperti perusahaan BUMN atau swasta yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*; dan
2. Minimnya kegiatan sosialisasi bidang perumahan yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V sehingga beberapa *stakeholder* bidang perumahan tidak mengetahui adanya kegiatan, seperti beberapa pengembang yang belum mengetahui adanya kegiatan bantuan pembangunan PSU bagi rumah umum; dan
3. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V masih terbatas yang menyebabkan adanya pegawai dengan tugas ganda.

Di tahun yang akan datang, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan mengharapkan agar penyelenggaraan perumahan di lingkungan Balai akan lebih berjalan dengan lebih baik lagi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dari dalam dan ke luar lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, khususnya kepada Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) serta mengoptimalkan pengelolaan dan proses menggali potensi SDM di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V; dan
3. Membuat terobosan-terobosan baru di bidang penyelenggaraan perumahan baik yang fisik maupun dukungan manajemen yang dapat lebih membuat penyelenggaraan kegiatan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi, Tabel dan Gambar	11
Daftar Singkatan	16
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	19
1.2 Tugas dan Fungsi	20
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	21
1.3.1 Struktur Organisasi	21
1.3.2 Sumber Daya Manusia	26
1.4 Sarana dan Prasarana	33
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik	33
1.4.2 Transformasi Digital	34
1.5 Isu Strategis	37
1.6 Sistematika Laporan	37
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Uraian Singkat Renstra	40
2.1.1 Visi dan Misi	40
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi	41
2.1.3 Program dan Kegiatan	42
2.2 Perjanjian Kinerja	43
2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal	43
2.2.2 Perjanjian Kinerja Akhir	44
2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	45
2.3 Metode Pengukuran	46
2.4 Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra	46
2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra	46
2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Renstra	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	51
3.2 Capaian Kinerja	55
3.2.1 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	56

DAFTAR ISI

3.2.2 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	63
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja	65
3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	65
3.3.2 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah	69
3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja pada Unit yang Selevel	71
3.4 Analisis Realisasi Anggaran	72
3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	72
3.4.2 Realisasi Anggaran	73
3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya	77
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	78
3.5.1 Sumber Daya Manusia	78
3.5.2 Sarana dan Prasarana	78
3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja	79
3.6.1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja	80
3.6.2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja . . .	80
3.6.3 Analisis Penyesuaian Aktivitas untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala	80
3.6.4 Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala	80
3.6.5 Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja	80
3.6.6 Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja	81
3.6.7 Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja	81
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan Umum	83
4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan	83
4.1.2 Faktor Penyebab Kegagalan	84
4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024	27
Tabel 1.2	Sebaran ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	29
Tabel 1.3	Sebaran Non-ASN, KI dan KI Pendukung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 .	31
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana BP2P Sumatera V Tahun 2024	33
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024	42
Tabel 2.2	Target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menurut RENSTRA Tahun 2020-2024 dan Capaian Hingga Tahun 2023	46
Tabel 2.3	Target Kinerja Balai di Provinsi Sumatera Selatan TA 2024	47
Tabel 2.4	Target Kinerja Balai di Provinsi Sumatera Selatan TA 2024	48
Tabel 2.5	Target Kinerja Balai di Provinsi Lampung TA 2024	48
Tabel 2.6	Target Kinerja Balai di Provinsi Kep. Bangka Belitung TA 2024	49
Tabel 3.1	Target Kinerja Dukungan Manajemen di Balai P2P Sumatera V TA 2024	51
Tabel 3.2	Tindak Lanjut atas Rekomendasi pada LHE Implementasi AKIP Tahun 2023	52
Tabel 3.3	Target Kinerja Balai P2P Sumatera V Tahun 2024	55
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Balai P2P Sumatera V Tahun 2024	56
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Balai P2P Sumatera V Tahun 2024	57
Tabel 3.6	Target Kinerja Balai P2P Sumatera V Tahun 2024	64
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Balai P2P Sumatera V Tahun 2024	64
Tabel 3.8	Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2015-2024	66
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dengan Target Renstra 2020-2024	70
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Balai P2P Sumatera V dengan Unit yang Selevel . .	71
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Hingga Akhir Desember Tahun 2024	73
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023 dan Tahun 2024	77
Tabel 3.13	Rasio Penugasan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	78
Tabel 3.14	Analisis Kebutuhan Ruang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V . .	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU)	35
Gambar 1.1	Website Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (<i>e-Procurement</i>) - ipse.lkpp.go.id	35
Gambar 1.1	<i>Intergrated e-Monitoring</i> Kementerian PUPR	36
Gambar 3.1	Bagan Alur Perubahan DIPA Balai P2P Sumatera V Tahun 2024	72

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Struktur dan Organisasi Balai P2P Sumatera V	21
Bagan 1.2	Struktur Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2024	22

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Rasio Sebaran Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024	27
Diagram 1.2	Klasifikasi ASN Balai P2P Sumatera V Berdasarkan Gender	29
Diagram 1.3	Klasifikasi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Teknis dan Non Teknis	30
Diagram 1.4	Komposisi Pegawai Non-ASN, KI dan KI Pendukung Balai P2P Sumatera V	31
Diagram 1.5	Rasio Perbandingan Pegawai Non-ASN, KI dan KI Pendukung Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024	28
Grafik 1.2	Klasifikasi ASN Balai P2P Sumatera V Berdasarkan Kelompok Usia	29
Grafik 1.3	Klasifikasi ASN Balai P2P Sumatera V Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024 . . .	30
Grafik 1.4	Klasifikasi ASN Balai P2P Sumatera V Berdasarkan Golongan	31
Grafik 1.5	Klasifikasi Pegawai Non-ASN, KI dan KI Pendukung Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	32
Grafik 3.1	Penyelenggaraan Bantuan PSU bagi Rumah Umum MBR BP2P Sumatera V TA 2020-2024	60
Grafik 3.2	Penyelenggaraan Perumahan Melalui Rumah Swadaya BP2P Sumatera V TA 2020-2024	61
Grafik 3.3	Penyelenggaraan Perumahan Melalui Rumah Khusus BP2P Sumatera V TA 2020-2024	62
Grafik 3.4	Penyelenggaraan Perumahan Melalui Rumah Susun BP2P Sumatera V TA 2020-2024 .	63

DAFTAR SINGKATAN

AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	Aparatur Sipil Negara
BMN	Barang Milik Negara
BSPS	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
CPB	Calon Penerima Bantuan
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IKK	Indikator Kinerja Kunci
KI	Konsultan Individual
KRS	Klinik Rumah Swadaya
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
OPOR	Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
PKE	Penanganan Kemiskinan Ekstrem
PK	Perjanjian Kinerja
PKP	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PSR	Program Sejuta Rumah
PSU	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RENSTRA	Rencana Strategis
RITTA	Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa
RP3KP	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
RTLH	Rumah Tidak Layak Huni
RUK	Rumah Umum dan Komersial
RUSUN	Rumah Susun
RUSUS	Rumah Khusus
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia

DAFTAR SINGKATAN

SIBARU	Sistem Informasi Bantuan Perumahan
SMAP	Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
STA	Serah Terima Aset
TUKIN	Tunjangan Kinerja
ZI	Zona Integritas
3T	Terluar, Terpencil, dan Tertinggal

PENDAHULUAN

BAB 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan perumahan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Selain daripada itu, faktor urbanisasi yang semakin marak terlaksana menyebabkan adanya tuntutan akan kebutuhan perumahan di perkotaan semakin besar, sementara minimnya lahan yang tersedia dan lonjakan harga dari tanah yang semakin tinggi menyebabkan pekerjaan akan penyediaan perumahan menjadi sulit untuk terlaksana secara baik.

Di tahun 2024, Pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk kembali mendorong perekonomian nasional. Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan, tidak hanya mengemban tugas untuk melaksanakan penyediaan perumahan guna menuntaskan kebutuhan perumahan dan mengurangi angka backlog saja, namun juga dalam rangka untuk mendukung Program Nasional, di antaranya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, instansi pemerintah wajib membuat laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja dan anggaran yang telah diberikan. Oleh karena itu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, dalam hal ini menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 guna memberikan laporan yang transparan dan akuntabel terhadap anggaran dan kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Oleh karena itu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dalam hal ini menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 guna memberikan laporan yang transparan dan akuntabel terhadap anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Adapun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V juga menaungi 3 (tiga) satuan kerja di bawahnya yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perumahan dan dipimpin oleh Kepala Balai. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.

Dalam melakukan tugas tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- f. Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- g. Koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
- h. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

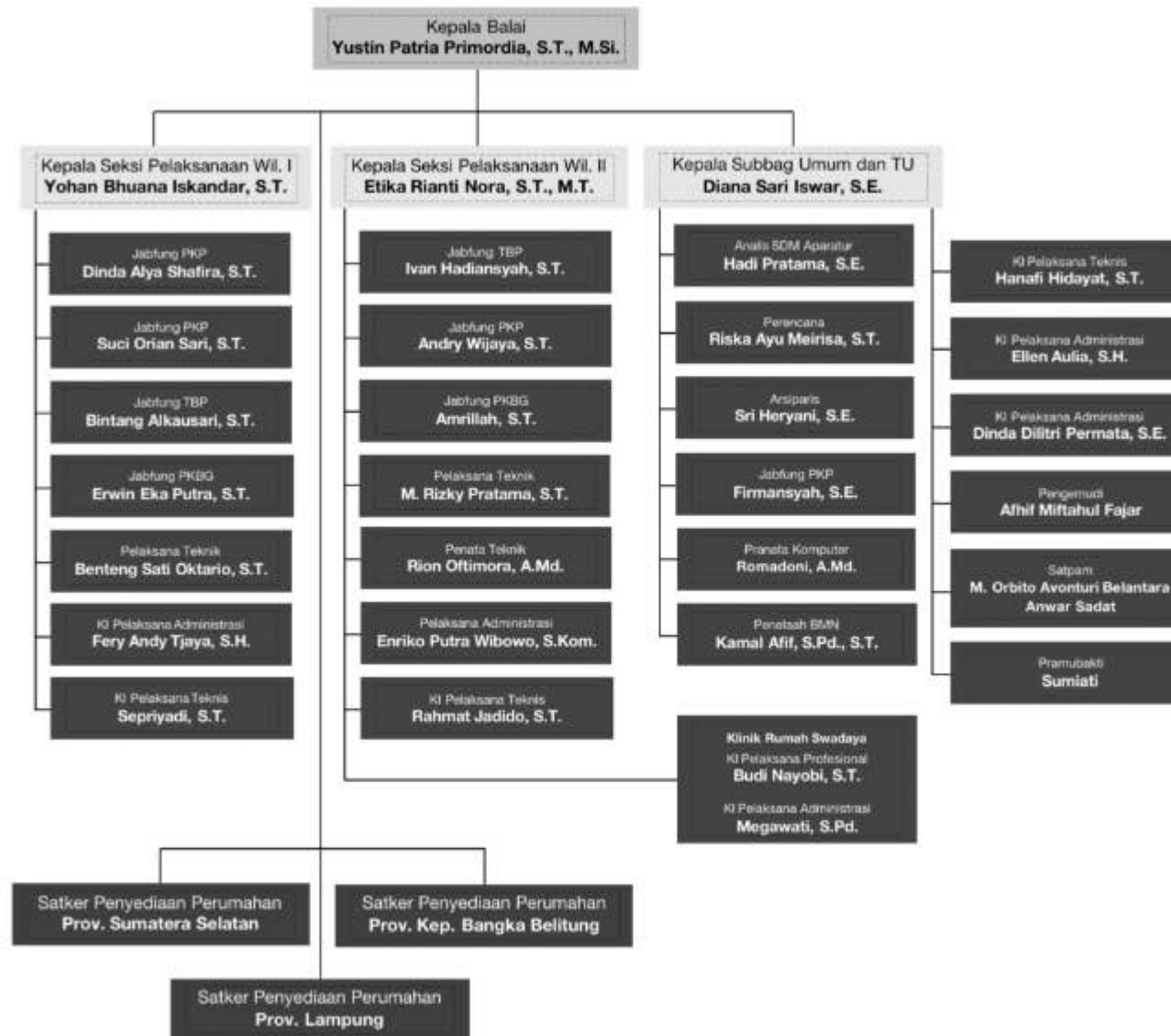
1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menurut Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1.1 Struktur dan Organisasi Balai P2P Sumatera V

Adapun struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat dijabarkan melalui bagan di bawah ini.



Bagan 1.2 Struktur Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2024

Berdasarkan pasal 160 dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2021 tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

a. Kepala Balai

Adapun tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Balai memiliki tanggung jawab untuk:

- Menyusun program dan anggaran pelaksanaan pembangunan serta rencana teknis pembangunan;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- Melaksanakan fasilitasi serah terima aset;
- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga balai;
- Mengelola data dan informasi pelaksanaan pembangunan;
- Melakukan koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
- Melakukan koordinasi penyediaan dan pengembangan lahan; dan
- Melaksanakan fungsi dan tugas lain oleh Direktorat Jenderal Perumahan.

b. Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha. Adapun yang menjadi lingkup pekerjaan Subbagian Umum dan Tata Usaha antara lain:

- Melaksanakan administrasi ketatausahaan;
- Melaksanakan verifikasi produk hukum pelaksanaan program kegiatan;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran;
- Mengelola pembukuan bendahara dan keuangan;
- Menyusun Dokumen Penggunaan Anggaran;
- Menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa;
- Melaksanakan penatausahaan keuangan administrasi pengajuan permintaan dan verifikasi administrasi keuangan serta Laporan Keuangan;
- Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang, pemeliharaan aset, daftar inventarisasi aset dan laporan pengadaan barang;

- Melaksanakan pemeliharaan Gedung Kantor, Peralatan, dan urusan kerumahtanggaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai; dan
- Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai sesuai standar yang ditetapkan.

c. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah

Seksi Pelaksanaan Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi Wilayah yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- Melakukan penelaahan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan penyediaan perumahan;
- Melaksanakan pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- Melaksanakan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perumahan;
- Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;
- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan penyediaan perumahan;
- Melaksanakan penyiapan data sebagai bahan fasilitasi penyediaan rumah layak huni;
- Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan perumahan dan permukiman, serta menyajikan alternatif pemecahan;
- Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi, dan loyalitas bawahan;
- Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki 2 (dua) Kepala Seksi (Kasi) Wilayah, dimana Kasi Wilayah I menaungi seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan dan Kasi Wilayah II menaungi seluruh wilayah di Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Wilayah melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja yang bekerja di wilayah kerjanya.

Hal ini berdasar pada Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 480/KPTS/M/2021 tanggal 17 Mei 2022 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR yang kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Nomor: 1044/KPTS/M/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 61/KPTS/M/2021, Nomor 1009/KPTS/M/2021, Nomor 480/KPTS/M/2022, Nomor 590/KPTS/M/2022, Nomor 1686/KPTS/M/2022 dan Nomor 686/KPTS/M/2023 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan.

- Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 480/KPTS/M/2021 tanggal 17 Mei 2022

[illegible]

- Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1044/KPTS/M/2023 tanggal 16 Agustus 2023

No.	Nama Berkas	Nama Organisasi/Instansi/Unit Kerja	Jenis Pengantar	Jenis Kategori Pengantar	Jenis Kategori Pengantar	Jenis Kategori Pengantar	Jenis Kategori Pengantar	Jenis Kategori Pengantar	Jenis Kategori Pengantar	Jenis Kategori Pengantar	Jenis Kategori Pengantar	Kategori		
												Keputusan	Keputusan	Keputusan
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

- Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 2814/KPTS/M/2024 tanggal 18 Oktober 2024

[illegible]

1.3.2 Sumber Daya Manusia

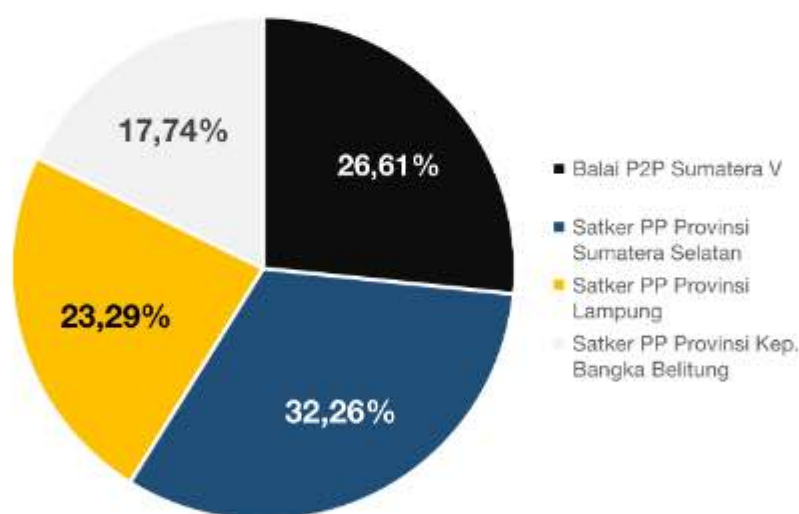
Sumber daya manusia atau SDM merupakan motor penggerak pada suatu perusahaan dan berfungsi sebagai aset suatu perusahaan. SDM sendiri dapat dilihat dari dua aspek, yaitu SDM dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas SDM terkait dengan angka, yaitu seberapa banyak SDM yang tersedia untuk berkontribusi mengarahkan daya pikir dan fisiknya untuk suatu organisasi. Sedangkan SDM dilihat dari segi kualitas yaitu terkait mutu dan daya saing secara fisik dan pikir dalam suatu organisasi.

Pada tahun 2024, jumlah total pegawai yang bekerja di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V adalah 124 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara Pusat, Non-Aparatur Sipil Negara, Konsultan Individual dan Konsultan Individual Pendukung, seperti pada tabel di bawah ini.

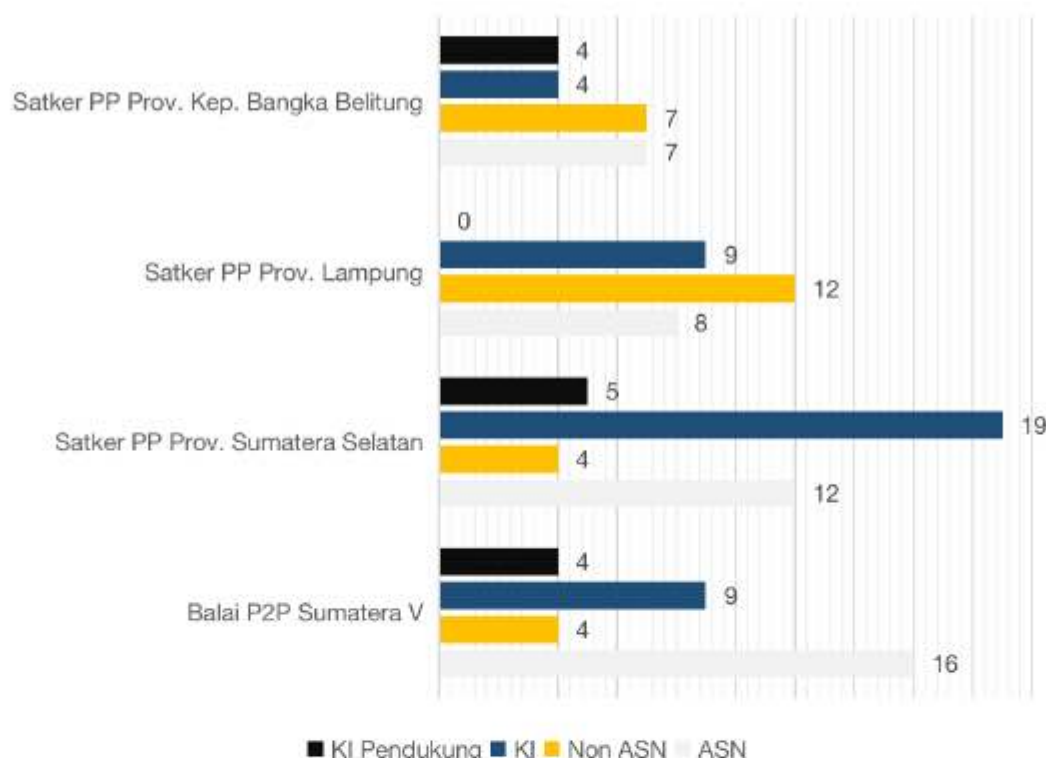
Tabel 1.1 Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK)	43 Orang
2	Non-Aparatur Sipil Negara	27 Orang
3	Konsultan Individual	41 Orang
4	Konsultan Individual Pendukung	13 Orang
TOTAL		124 Orang

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) yang bekerja di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V hanya 34,68% dari total keseluruhan dan sisanya sebesar 65,23% didominasi oleh Non Aparatur Sipil Negara, Konsultan Individual dan Konsultan Individual Pendukung yang bertugas sesuai dengan kontrak masing-masing. Selain bertugas di kantor balai, pegawai ini juga tersebar di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Diagram 1.1** Rasio Sebaran Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024

Adapun komposisi pemetaan pegawai di masing-masing wilayah kerja dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 1.1 Komposisi Pegawai di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024

a. Data Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan data sebelumnya, Aparatur Sipil Negara yang bekerja di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V berjumlah 43 orang yang terdiri dari 27 orang PNS dan 16 orang PPPK.

- **Klasifikasi ASN Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelaminnya, ASN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki rasio yang cukup signifikan yaitu 26 orang (60,46%) merupakan pegawai laki-laki dan 17 orang (39,54%) merupakan pegawai wanita. Selain itu, dalam pembagian wewenang jabatan pula, tidak ada perbedaan khusus diantara kedua gender ini.

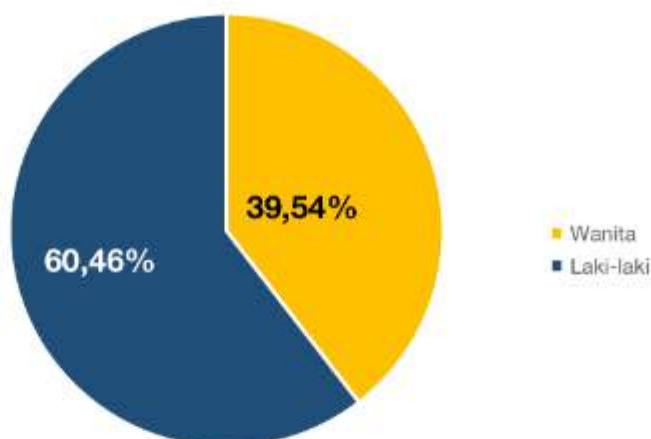


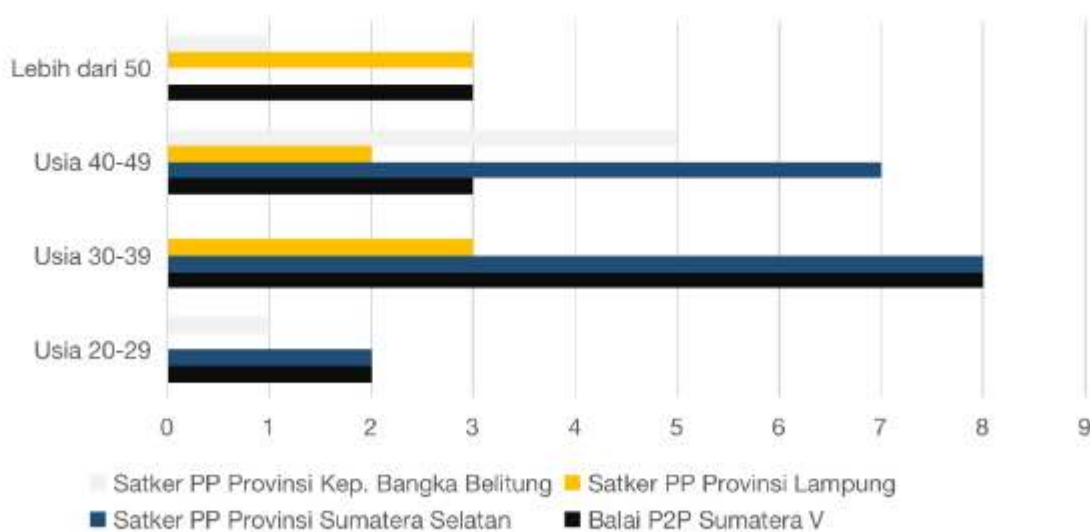
Diagram 1.2 Klasifikasi ASN Balai P2P Sumatera V Berdasarkan Gender

Tabel 1.2 Sebaran ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

JENIS KELAMIN	Balai P2P Sumatera V	Satker PP Prov. Sumsel	Satker PP Prov. Lampung	Satker PP Prov. Kep. Babel
LAKE-LAKE	8 Orang	9 Orang	4 Orang	5 Orang
WANITA	8 Orang	3 Orang	4 Orang	2 Orang
TOTAL	16 Orang	12 Orang	8 Orang	7 Orang

- **Klasifikasi ASN Berdasarkan Kelompok Usia**

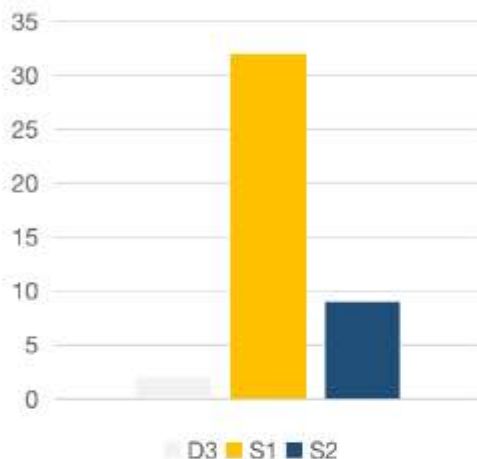
Berdasarkan kelompok usia, ASN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V didominasi oleh kelompok usia ≥ 40 s.d. 49 tahun sebesar 39,53% diikuti oleh kelompok usia ≥ 30 s.d. 39 tahun sebesar 30,32%, kelompok usia lebih dari 50 tahun sebanyak 16,28% dan kelompok usia di bawah 30 tahun hanya 13,95%.



Grafik 1.2 Klasifikasi ASN Balai P2P Sumatera V Berdasarkan Kelompok Usia

- **Klasifikasi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki 43 orang ASN, dimana sebanyak 4,65% merupakan pegawai yang telah menempuh pendidikan hingga D-3 dan sebanyak 74,42% merupakan pegawai yang telah menempuh pendidikan hingga S-1. Sementara pegawai yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang S-2 adalah sebesar 20,93%. Adapun data terkait jenjang pendidikan yang telah ditempuh ASN Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat dilihat pada grafik dan diagram di bawah ini.



Grafik 1.3 Klasifikasi ASN Balai P2P Sumatera V Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

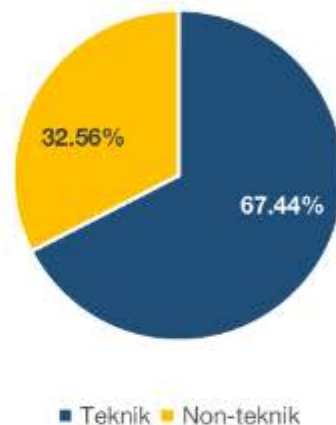
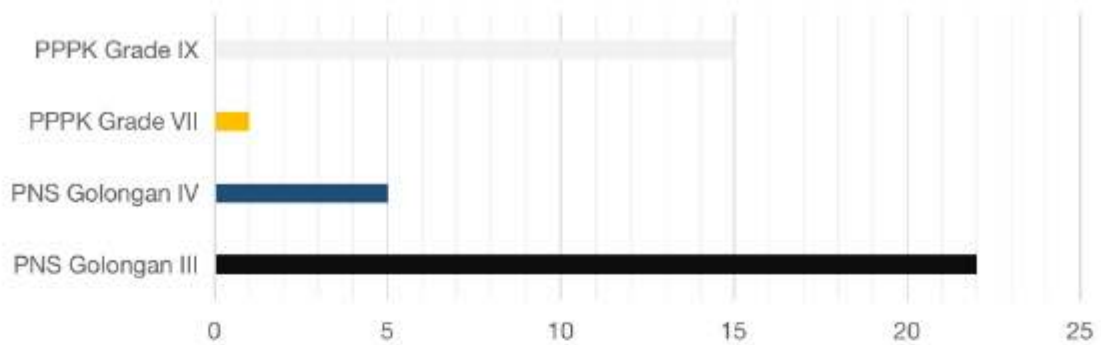


Diagram 1.3 Klasifikasi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Teknis dan Non Teknis

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, ASN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V secara garis besar merupakan pegawai berlatar belakang pendidikan Teknik berjumlah 29 orang yang didominasi oleh lulusan dari jurusan Teknik Sipil. Sedangkan 14 orang lainnya berasal dari latar belakang pendidikan non-teknis yang didominasi oleh sarjana ekonomi (S.E.).

- **Klasifikasi ASN Berdasarkan Golongan**

Adapun jika dilihat berdasarkan golongan, PNS di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V terbagi atas 3 (tiga) golongan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V didominasi oleh ASN Golongan III sebanyak 22 orang dan dilanjutkan dengan Golongan IV berjumlah 5 orang. Selain itu, PPPK pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V terdiri dari 2 *grade* yaitu *grade* VII sebanyak 1 orang dan *grade* IX sebanyak 15 orang.



Grafik 1.4 Klasifikasi ASN Balai P2P Sumatera V Berdasarkan Golongan

b. Data Non-Aparatur Sipil Negara (ASN), Konsultan Individual (KI) dan KI Pendukung

Demi menunjang kinerja Balai dan Satuan Kerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dibantu pula oleh Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Konsultan Individual (KI) dan KI Pendukung, yang berkontrak secara khusus demi menunjang jalannya suatu kegiatan atau suatu bagian.

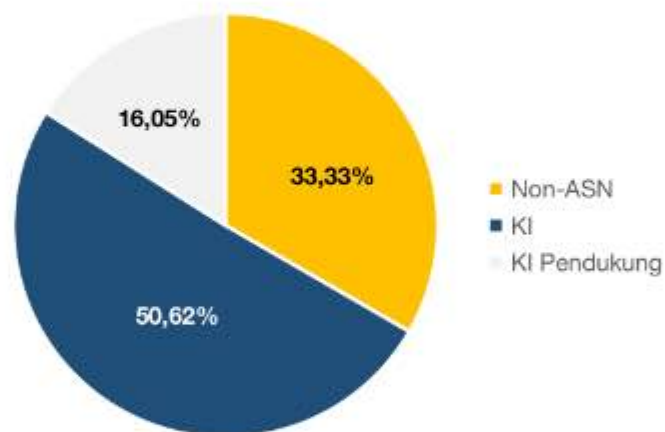


Diagram 1.4 Komposisi Pegawai Non-ASN, KI dan KI Pendukung Balai P2P Sumatera V

Berdasarkan wilayah kerjanya, jumlah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Sebaran Non-ASN, KI dan KI Pendukung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

JENIS KELAMIN	Balai P2P Sumatera V			Satker PP Prov. Sumsel			Satker PP Prov. Lampung			Satker PP Prov. Kep. Babel		
	Non ASN	KI	KI Pend.	Non ASN	KI	KI Pend.	Non ASN	KI	KI Pend.	Non ASN	KI	KI Pend.
PEGAWAI												
LAKI-LAKI	4	6	3	4	13	3	9	8	0	5	2	4
PEREMPUAN	0	3	1	0	6	2	3	1	0	2	2	0
TOTAL	4	9	4	4	19	5	12	9	0	7	4	4

- **Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh, Pegawai Non-ASN, Konsultan Individual (KI) dan KI Pendukung terbagi atas 4 (empat) jenjang pendidikan yaitu: Sarjana S-1, Sarjana S-2, Kelompok Diploma (D-I s.d. D-IV), dan SMA/ sederajat. Sebanyak 24,69% adalah pegawai yang sudah menempuh pendidikan SMA sementara 9,88% telah menempuh pendidikan diploma. Sedangkan pegawai yang telah menempuh pendidikan hingga S-1 mendominasi dengan jumlah mencapai 60,49% dan hanya sekitar 4,94% yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang S-2.

Adapun klasifikasi Pegawai Non-ASN, Konsultan Individual (KI) dan KI Pendukung berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya, dapat dilihat berdasarkan diagram dan grafik di bawah ini.

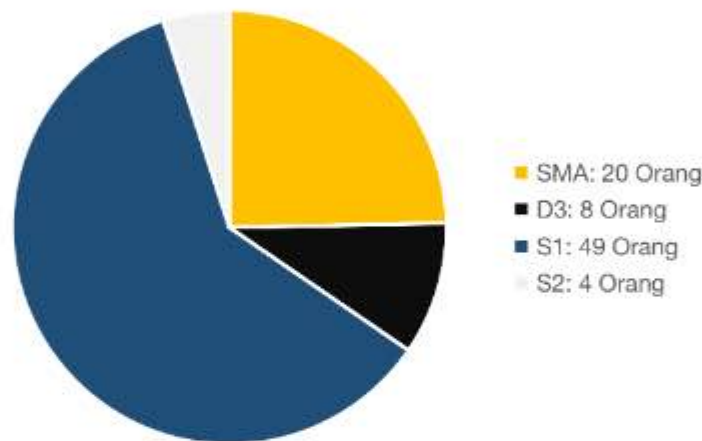
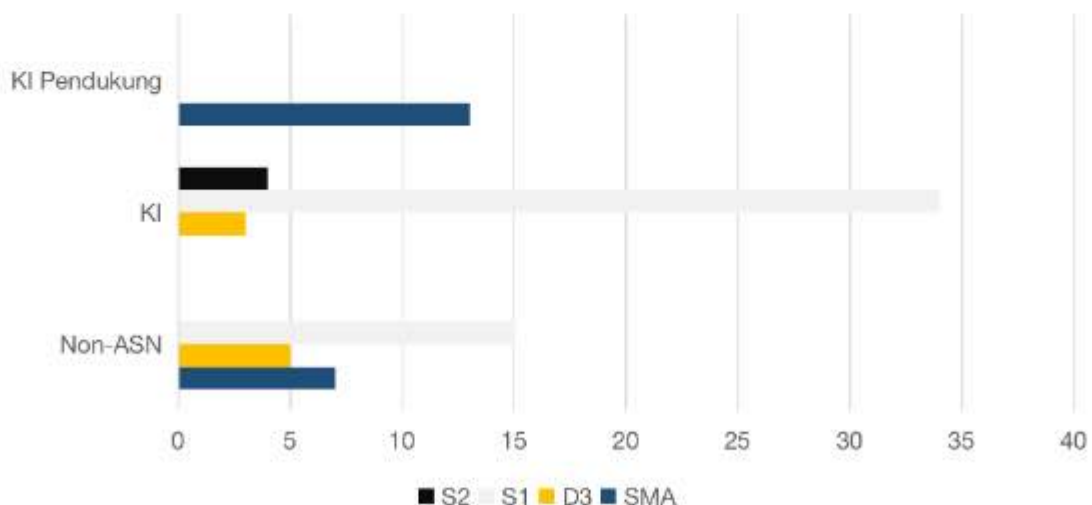


Diagram 1.5 Rasio Perbandingan Pegawai Non-ASN, KI dan KI Pendukung Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024



Grafik 1.5 Klasifikasi Pegawai Non-ASN, KI dan KI Pendukung Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

1.4 Sarana dan Prasarana

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan prasarana pada unit atau satuan kerja yang dianggarkan melalui anggaran negara, atau dalam hal ini melalui pembiayaan APBN, dimasukkan dalam daftar aset Barang Milik Negara (BMN) oleh unit atau satuan kerja masing-masing.

Di tahun 2024, dalam mendukung kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V terdapat 263 sarana dan prasarana dengan nilai Rp. 1.142.428.000,-. Sarana dan prasarana ini terdiri dari peralatan kantor dan alat pengolah data (mesin) seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana BP2P Sumatera V Tahun 2024

KODE	URAIAN	KUANTITAS	SATUAN	NILAI (Rp)
3020104001	Sepeda Motor	1	Unit	33,520,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	15	Buah	43,093,000
3050104002	Lemari Kayu	11	Buah	37,026,000
3050104004	Rak Kayu	1	Buah	2,244,000
3050104005	<i>Filing Cabinet</i> Besi	1	Buah	3,000,000
3050104007	Brankas	1	Buah	6,000,000
3050105007	<i>CCTV - Camera Control Television System</i>	2	Buah	22,810,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	2	Buah	9,800,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	Buah	15,000,000
3050105048	<i>LCD Projector/Infocus</i>	3	Buah	30,476,000
3050105058	<i>Focusing Screen/Layar</i> LCD Projector	1	Buah	2,244,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Meta	2	Buah	3,000,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	35	Buah	43,269,500
3050201003	Kursi Besi/Metal	49	Buah	32,881,000
3050201004	Kursi Kayu	46	Buah	25,806,000
3050201005	<i>Sice</i>	5	Buah	16,607,000
3050201008	Meja Rapat	2	Buah	3,366,000
3050204001	Lemari Es	1	Buah	2,375,000
3050204004	<i>A.C. Split</i>	6	Buah	31,600,000
3050206002	Televisi	1	Buah	7,175,000
3050206008	Sound System	1	Buah	7,700,000
3050206020	Camera Video	1	Buah	1,683,000
3050206036	Dispenser	1	Buah	3,366,000
3050206058	Gordyin/Kray	7	Buah	6,058,780

Lanjutan Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana BP2P Sumatera V Tahun 2024

KODE	URAIAN	KUANTITAS	SATUAN	NILAI (Rp)
3060102128	Camera Digital	1	Buah	17,875,000
3060102132	Video Conference	2	Buah	12,200,000
3060102167	Drone	1	Buah	23,943,000
3080108044	Lightweight Concrete Test Hammer	1	Buah	16,527,000
3100102001	PC Unit	4	Buah	47,675,000
3100102002	Laptop	24	Buah	326,417,720
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	Buah	62,560,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Buah	23,130,000
8010101001	Software Komputer	1	Dummy	222,000,000
Jumlah		263	-	1,142,428,000

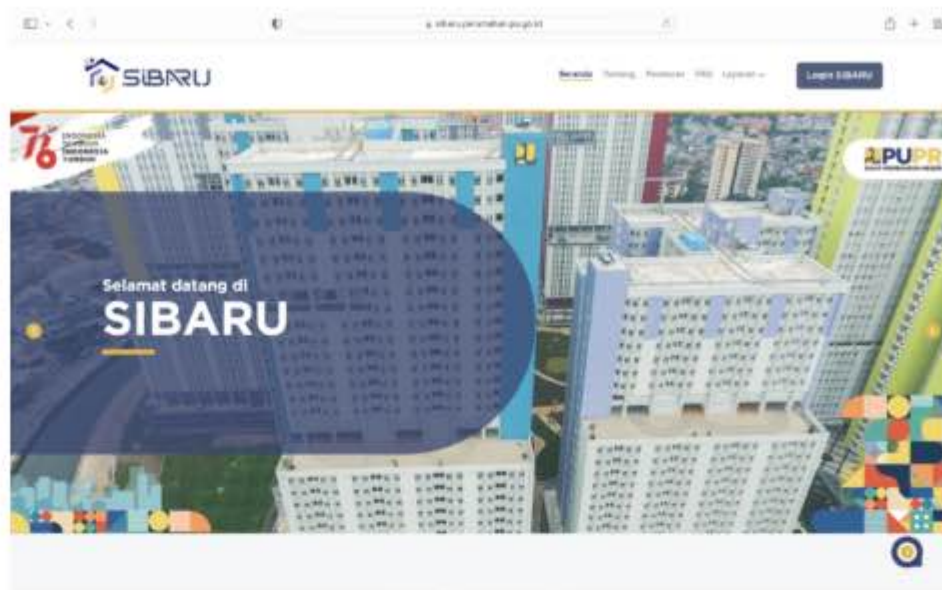
1.4.2 Transformasi Digital

Di dalam sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan, terdapat rangkaian proses mulai dari perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan pelaksanaan yang mana monitoring dan evaluasi berperan dalam setiap tahapannya.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah membangun sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan meningkatkan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan, diantaranya pemanfaatan teknologi informasi untuk proses pelelangan/tender secara elektronik dan sistem pemantauan pelaksanaan dan penyerapan anggaran secara elektronik. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki aplikasi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai efisiensi.

a. Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU)

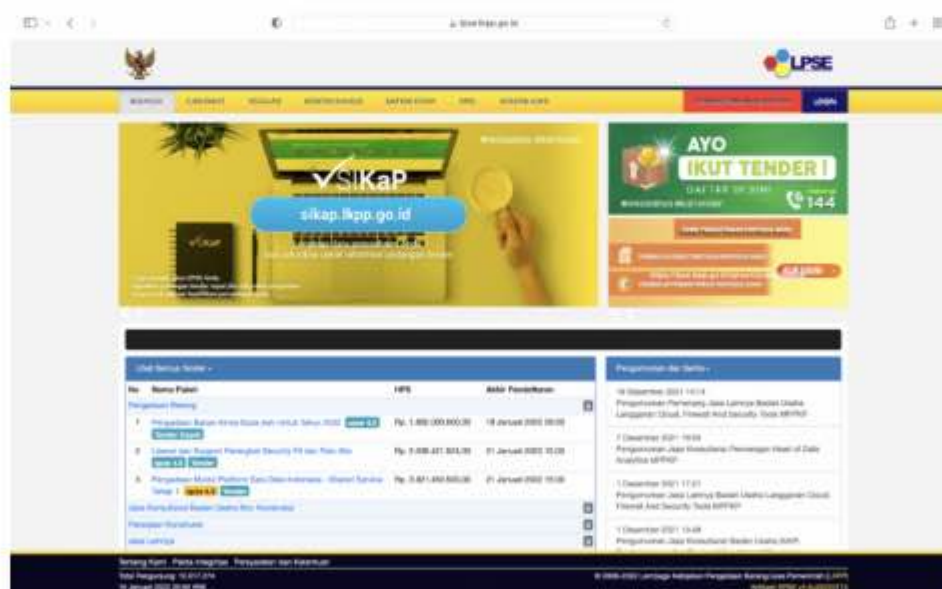
Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) adalah perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Direktorat Jenderal Perumahan yang dirancang untuk menyediakan sistem informasi tata kelola bantuan perumahan yang terpadu dan mendukung proses bisnis pengelolaan bantuan perumahan mulai dari tahap pengusulan bantuan, monitoring pelaksanaan pembangunan dan sebaran lokasinya, hingga akhirnya bantuan perumahan tersebut dihuni dan/atau diserahterimakan ke calon penerima manfaat.



Gambar 1.1 Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU)

b. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah melakukan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*). Pelaksanaan *e-Procurement* dilakukan secara bertahap dari sisi penerapan transaksi elektronik dan wilayah cakupan implementasinya. Implementasi disesuaikan dengan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi komunikasi di suatu wilayah.



Gambar 1.2 Website Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (*e-Procurement*) - lpse.lkpp.go.id

c. *Intergrated e-Monitoring* Kementerian PUPR

Sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik (*e-Monitoring*) merupakan upaya untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Data yang dimasukkan ke dalam *e-Monitoring* adalah data yang akurat atau sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga data tersebut menjadi akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem *e-Monitoring* berisikan data progres pelaksanaan kegiatan. Data tersebut digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari kepala satker kepada pimpinan unit organisasi maupun dari pimpinan unit organisasi kepada menteri PUPR.



Gambar 1.3 *Intergrated e-Monitoring* Kementerian PUPR

Keberadaan sistem *e-Monitoring*, pelaporan data progress pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan akurat sehingga membantu pengambilan keputusan oleh pimpinan dengan tepat.

d. *Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Melalui Aplikasi*

Dalam mendukung pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di lapangan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menggunakan beberapa aplikasi pendukung selain *Intergrated e-Monitoring* Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terdapat aplikasi SIRUS yang berbasis website. Selain itu, dalam pengawasan pelaksanaan bantuan PSU rumah umum MBR digunakan aplikasi SIMONI-PSU yang berbasis website dan aplikasi SIRUSUN untuk pembangunan rumah susun.

1.5 Isu Strategis

Penyelenggaraan penyediaan perumahan merupakan suatu rangkaian kegiatan kompleks yang dalam pelaksanaannya akan banyak menemui hambatan dan tantangan. Di tahun 2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V terus memaksimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan untuk dapat meraih hasil yang mendekati optimal. Adapun beberapa isu-isu strategis yang dihadapi Balai di tahun ini diantaranya:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai yang menyebabkan beberapa orang harus mengerjakan pekerjaan di luar tugas pokok dan fungsinya;
- b. Minimnya peran Balai sebagai mediator diantara stakeholders untuk melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan penyediaan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan banyak berperan dalam verifikasi, pengawasan dan pengendalian penyediaan perumahan;
- c. Belum tersedianya basis data perumahan komprehensif yang mampu dijadikan acuan atau pedoman dalam menentukan strategi penyediaan perumahan yang tepat dan
- d. Belum tersedianya anggaran/dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih bahkan ketidakcocokan dalam pendanaan dalam pengadaan perumahan.

1.6 Sistematika Laporan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan adalah sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai latar belakang program dan kegiatan, tugas dan fungsi balai, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Selain itu juga dituangkan mengenai isu strategis yang ada pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dan dilengkapi juga dengan sistematika laporan yang digunakan.

- Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini berisi mengenai rencana kinerja kegiatan dan anggaran pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V yang telah disusun baik berdasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024 ataupun Renstra 2020-2024.

- Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini, menjelaskan mengenai akuntabilitas kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menerangkan mengenai capaian kinerja terhadap target yang telah direncanakan baik dari capaian output maupun dalam realisasi anggaran.

- Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan dan rencana tindak lanjut yang direkomendasikan untuk dapat dilaksanakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

- Lampiran

Berisi dokumentasi baik foto dan dokumen lainnya sebagai bahan pendukung dalam penyusunan LAKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

PERENCANAAN KINERJA

BAB 2

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

2.1.1 Visi dan Misi

Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2020–2024 melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rumah layak huni yang dimaksud dalam konteks ini adalah bangunan rumah yang memenuhi 4 (empat) indikator dasar sesuai dengan parameter *Sustainable Development Goals (SDGs)*, antara lain:

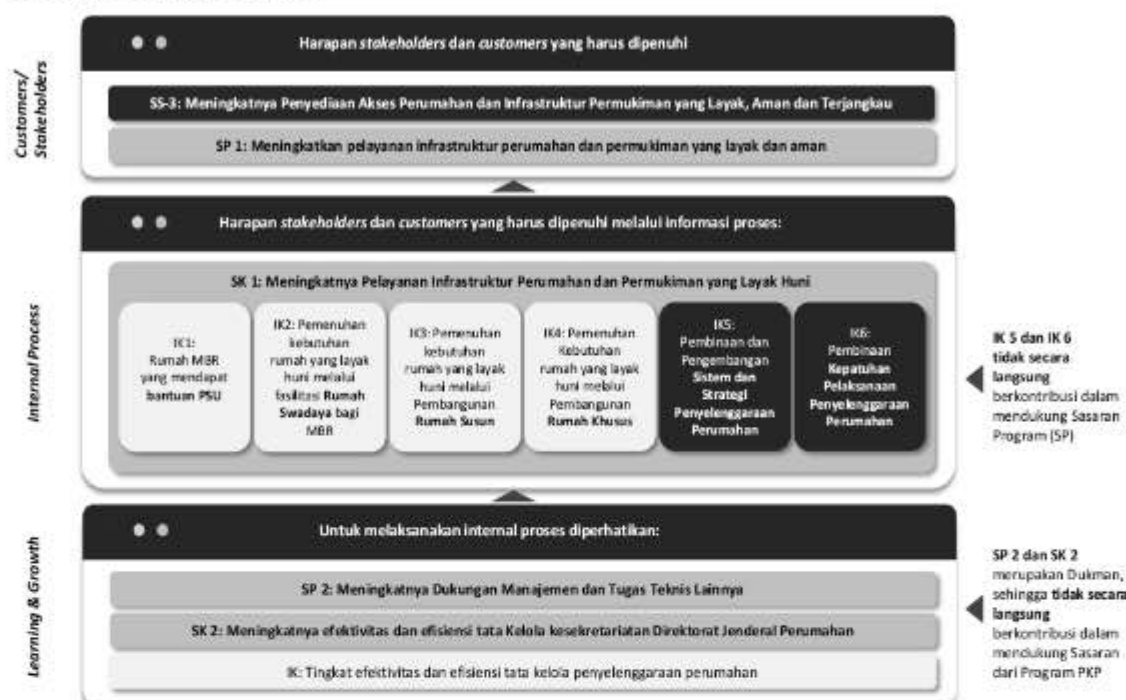
1. Kecukupan luas bangunan, yang menggunakan ketentuan minimal 7,2 m² per kapita penghuni;
2. Ketahanan konstruksi, untuk memastikan pemenuhan aspek kelayakan struktur/keselamatan bangunan dan kesehatan;
3. Akses air minum layak yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan harian penghuni;
4. Akses sanitasi layak.

Selain itu, pembangunan perumahan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan turut pula berperan dalam pencapaian misi kedua Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu menyelenggarakan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan oleh Direktorat Jenderal Perumahan juga sekaligus menjadi upaya dalam mewujudkan Sasaran Strategis Ke-3 (SS-3) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur pemukiman yang layak, aman, dan terjangkau dengan indikator kinerjanya adalah persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perumahan merencanakan 2 (dua) sasaran program yaitu: (1) Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Perumahan Permukiman yang Layak dan Aman, dan (2) Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknik Lainnya.

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Adapun dalam mencapai sasaran ini, Direktorat Jenderal Perumahan merumuskan peta strategis sebagai berikut:



Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di Kementerian PUPR, Renstra dibuat terlebih dahulu di tingkat Direktorat Jenderal baru kemudian Unit Organisasi, Unit Kerja, atau UPT membuat Renstra masing-masing.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2020-2024, tujuan penyelenggaraan perumahan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V adalah:

"Mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Sumatera V".

Dalam mendukung arahan Direktorat Jenderal Perumahan tersebut dan dalam rangka mewujudkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menetapkan beberapa sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan ketercapaian.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Adapun yang menjadi target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V di tahun 2020-2024 adalah:

1. Menyediakan 79.070 unit kebutuhan rumah melalui:
 - Pembangunan 3.340 unit Rumah Susun;
 - Pembangunan 453 unit Rumah Khusus; dan
 - Pembangunan 75.217 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik MBR.
2. Menyediakan PSU yang melayani 17.134 unit rumah milik MBR.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V merumuskan 2 (dua) sasaran kinerja yaitu: (1) Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni; dan (2) Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

Dalam mewujudkan kedua sasaran tersebut, dibuatlah indikator kinerja yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				AWAL	AKHIR
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan	3 Laporan
		2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	3.650 Unit	8.318 Unit
		3	Jumlah Rumah Susun yang Dibangun	161 Unit	150 Unit
		4	Jumlah Rumah Susun yang Dipelihara	3 Tower	2 Tower
		5	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	- Unit	- Unit
		6	Jumlah Rumah Khusus yang Dipelihara	- Unit	- Unit
		7	Jumlah Rumah Umum yang Mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU	900 Unit	675 Unit
		8	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	3 Laporan	3 Laporan
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
		2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	4 Layanan
		3	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yustin Patria Primordia**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024


Iwan Suprijanto
NIP. 19710910 199803 1 001


Yustin Patria Primordia
NIP. 19720626 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan ketertarikan rumah (Lapak 72%)	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan
	2. Jumlah Survei Stimulus Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	3.600 Unit
	3. Jumlah Rumah Swadaya yang dibangun	161 Unit
	4. Jumlah Rumah Swadaya yang dipelakan	3 Tahun
	5. Jumlah Rumah Swadaya yang dibangun	- Unit
	6. Jumlah Rumah Swadaya yang dipelakan	- Unit
	7. Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PKU	900 Unit
	8. Jumlah laporan pemukiman dan pengalangan keputusan intern dan manajemen risiko	3 Laporan
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi cara kerja keterkaitan Diseminasi Jendral Perumahan	1. Jumlah Layanan Sosial dan Promosi Internal	1 Layanan
	2. Jumlah Layanan Diseminasi Manajemen Risiko	4 Layanan
	3. Jumlah Layanan Perencanaan	4 Layanan
Kegiatan:		
1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman		
a. Raker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Rp	141.483.428.000
b. Raker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Rp	3.826.624.000
c. Raker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan	Rp	67.687.440.000
d. Raker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung	Rp	29.666.217.000
e. Raker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp	40.273.030.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan		
a. Raker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Rp	7.890.819.000
b. Raker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan	Rp	3.883.587.000
c. Raker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung	Rp	1.346.200.000
d. Raker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp	963.374.000
e. Raker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp	1.193.038.000
Paga Sektir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Rp	7.712.220.000
Paga Sektir Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan	Rp	69.033.990.000
Paga Sektir Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung	Rp	30.551.693.000
Paga Sektir Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp	41.466.088.000
Total	Rp	148.843.947.000
Jakarta, 16 Januari 2024		
Direktur Jenderal Perumahan		
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V		
Yustin Patria Primordia		
NIP. 19720626 199703 2 003		

2.2.2 Perjanjian Kinerja Akhir

REVISI AKHIR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Yustin Patris Primordia
Jabatan	: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	: Iwan Suprijanto
Jabatan	: Direktur Jenderal Perumahan

Selaku asasen langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Iwan Suprijanto
 NIP. 19710301 199803 1 001

Pihak Pertama


Yustin Patris Primordia
 NIP. 19720626 199703 2 003

[illegible]

2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Adapun Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah mengalami beberapa perubahan sepanjang tahun 2024, sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Awal

The image shows the cover page of the initial Performance Agreement (Perjanjian Kinerja) for 2024. It is titled 'PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024' and is signed by the Head of the Institution (Kepala Instansi) and the Head of the Agency (Kepala Badan). The document is dated 2024 and includes the logo of the Ministry of Housing and Urban Development and Planning (KEMENPPU).

NO	URAIAN	HALAMAN
1	DAFTAR ISI	1
2	DAFTAR LAMPIRAN	2
3	DAFTAR GAMBAR	3
4	DAFTAR TABEL	4
5	DAFTAR LAMPIRAN	5
6	DAFTAR GAMBAR	6
7	DAFTAR TABEL	7
8	DAFTAR LAMPIRAN	8
9	DAFTAR GAMBAR	9
10	DAFTAR TABEL	10
11	DAFTAR LAMPIRAN	11
12	DAFTAR GAMBAR	12
13	DAFTAR TABEL	13
14	DAFTAR LAMPIRAN	14
15	DAFTAR GAMBAR	15
16	DAFTAR TABEL	16
17	DAFTAR LAMPIRAN	17
18	DAFTAR GAMBAR	18
19	DAFTAR TABEL	19
20	DAFTAR LAMPIRAN	20
21	DAFTAR GAMBAR	21
22	DAFTAR TABEL	22
23	DAFTAR LAMPIRAN	23
24	DAFTAR GAMBAR	24
25	DAFTAR TABEL	25
26	DAFTAR LAMPIRAN	26
27	DAFTAR GAMBAR	27
28	DAFTAR TABEL	28
29	DAFTAR LAMPIRAN	29
30	DAFTAR GAMBAR	30
31	DAFTAR TABEL	31
32	DAFTAR LAMPIRAN	32
33	DAFTAR GAMBAR	33
34	DAFTAR TABEL	34
35	DAFTAR LAMPIRAN	35
36	DAFTAR GAMBAR	36
37	DAFTAR TABEL	37
38	DAFTAR LAMPIRAN	38
39	DAFTAR GAMBAR	39
40	DAFTAR TABEL	40
41	DAFTAR LAMPIRAN	41
42	DAFTAR GAMBAR	42
43	DAFTAR TABEL	43
44	DAFTAR LAMPIRAN	44
45	DAFTAR GAMBAR	45
46	DAFTAR TABEL	46
47	DAFTAR LAMPIRAN	47
48	DAFTAR GAMBAR	48
49	DAFTAR TABEL	49
50	DAFTAR LAMPIRAN	50
51	DAFTAR GAMBAR	51
52	DAFTAR TABEL	52
53	DAFTAR LAMPIRAN	53
54	DAFTAR GAMBAR	54
55	DAFTAR TABEL	55
56	DAFTAR LAMPIRAN	56
57	DAFTAR GAMBAR	57
58	DAFTAR TABEL	58
59	DAFTAR LAMPIRAN	59
60	DAFTAR GAMBAR	60
61	DAFTAR TABEL	61
62	DAFTAR LAMPIRAN	62
63	DAFTAR GAMBAR	63
64	DAFTAR TABEL	64
65	DAFTAR LAMPIRAN	65
66	DAFTAR GAMBAR	66
67	DAFTAR TABEL	67
68	DAFTAR LAMPIRAN	68
69	DAFTAR GAMBAR	69
70	DAFTAR TABEL	70
71	DAFTAR LAMPIRAN	71
72	DAFTAR GAMBAR	72
73	DAFTAR TABEL	73
74	DAFTAR LAMPIRAN	74
75	DAFTAR GAMBAR	75
76	DAFTAR TABEL	76
77	DAFTAR LAMPIRAN	77
78	DAFTAR GAMBAR	78
79	DAFTAR TABEL	79
80	DAFTAR LAMPIRAN	80
81	DAFTAR GAMBAR	81
82	DAFTAR TABEL	82
83	DAFTAR LAMPIRAN	83
84	DAFTAR GAMBAR	84
85	DAFTAR TABEL	85
86	DAFTAR LAMPIRAN	86
87	DAFTAR GAMBAR	87
88	DAFTAR TABEL	88
89	DAFTAR LAMPIRAN	89
90	DAFTAR GAMBAR	90
91	DAFTAR TABEL	91
92	DAFTAR LAMPIRAN	92
93	DAFTAR GAMBAR	93
94	DAFTAR TABEL	94
95	DAFTAR LAMPIRAN	95
96	DAFTAR GAMBAR	96
97	DAFTAR TABEL	97
98	DAFTAR LAMPIRAN	98
99	DAFTAR GAMBAR	99
100	DAFTAR TABEL	100

Perjanjian Kinerja Revisi I

The image shows the cover page of the first revised Performance Agreement (Perjanjian Kinerja Revisi I) for 2024. It is titled 'PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024' and is signed by the Head of the Institution (Kepala Instansi) and the Head of the Agency (Kepala Badan). The document is dated 2024 and includes the logo of the Ministry of Housing and Urban Development and Planning (KEMENPPU).

NO	URAIAN	HALAMAN
1	DAFTAR ISI	1
2	DAFTAR LAMPIRAN	2
3	DAFTAR GAMBAR	3
4	DAFTAR TABEL	4
5	DAFTAR LAMPIRAN	5
6	DAFTAR GAMBAR	6
7	DAFTAR TABEL	7
8	DAFTAR LAMPIRAN	8
9	DAFTAR GAMBAR	9
10	DAFTAR TABEL	10
11	DAFTAR LAMPIRAN	11
12	DAFTAR GAMBAR	12
13	DAFTAR TABEL	13
14	DAFTAR LAMPIRAN	14
15	DAFTAR GAMBAR	15
16	DAFTAR TABEL	16
17	DAFTAR LAMPIRAN	17
18	DAFTAR GAMBAR	18
19	DAFTAR TABEL	19
20	DAFTAR LAMPIRAN	20
21	DAFTAR GAMBAR	21
22	DAFTAR TABEL	22
23	DAFTAR LAMPIRAN	23
24	DAFTAR GAMBAR	24
25	DAFTAR TABEL	25
26	DAFTAR LAMPIRAN	26
27	DAFTAR GAMBAR	27
28	DAFTAR TABEL	28
29	DAFTAR LAMPIRAN	29
30	DAFTAR GAMBAR	30
31	DAFTAR TABEL	31
32	DAFTAR LAMPIRAN	32
33	DAFTAR GAMBAR	33
34	DAFTAR TABEL	34
35	DAFTAR LAMPIRAN	35
36	DAFTAR GAMBAR	36
37	DAFTAR TABEL	37
38	DAFTAR LAMPIRAN	38
39	DAFTAR GAMBAR	39
40	DAFTAR TABEL	40
41	DAFTAR LAMPIRAN	41
42	DAFTAR GAMBAR	42
43	DAFTAR TABEL	43
44	DAFTAR LAMPIRAN	44
45	DAFTAR GAMBAR	45
46	DAFTAR TABEL	46
47	DAFTAR LAMPIRAN	47
48	DAFTAR GAMBAR	48
49	DAFTAR TABEL	49
50	DAFTAR LAMPIRAN	50
51	DAFTAR GAMBAR	51
52	DAFTAR TABEL	52
53	DAFTAR LAMPIRAN	53
54	DAFTAR GAMBAR	54
55	DAFTAR TABEL	55
56	DAFTAR LAMPIRAN	56
57	DAFTAR GAMBAR	57
58	DAFTAR TABEL	58
59	DAFTAR LAMPIRAN	59
60	DAFTAR GAMBAR	60
61	DAFTAR TABEL	61
62	DAFTAR LAMPIRAN	62
63	DAFTAR GAMBAR	63
64	DAFTAR TABEL	64
65	DAFTAR LAMPIRAN	65
66	DAFTAR GAMBAR	66
67	DAFTAR TABEL	67
68	DAFTAR LAMPIRAN	68
69	DAFTAR GAMBAR	69
70	DAFTAR TABEL	70
71	DAFTAR LAMPIRAN	71
72	DAFTAR GAMBAR	72
73	DAFTAR TABEL	73
74	DAFTAR LAMPIRAN	74
75	DAFTAR GAMBAR	75
76	DAFTAR TABEL	76
77	DAFTAR LAMPIRAN	77
78	DAFTAR GAMBAR	78
79	DAFTAR TABEL	79
80	DAFTAR LAMPIRAN	80
81	DAFTAR GAMBAR	81
82	DAFTAR TABEL	82
83	DAFTAR LAMPIRAN	83
84	DAFTAR GAMBAR	84
85	DAFTAR TABEL	85
86	DAFTAR LAMPIRAN	86
87	DAFTAR GAMBAR	87
88	DAFTAR TABEL	88
89	DAFTAR LAMPIRAN	89
90	DAFTAR GAMBAR	90
91	DAFTAR TABEL	91
92	DAFTAR LAMPIRAN	92
93	DAFTAR GAMBAR	93
94	DAFTAR TABEL	94
95	DAFTAR LAMPIRAN	95
96	DAFTAR GAMBAR	96
97	DAFTAR TABEL	97
98	DAFTAR LAMPIRAN	98
99	DAFTAR GAMBAR	99
100	DAFTAR TABEL	100

Perjanjian Kinerja Revisi II

The image shows the cover page of the second revised Performance Agreement (Perjanjian Kinerja Revisi II) for 2024. It is titled 'PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024' and is signed by the Head of the Institution (Kepala Instansi) and the Head of the Agency (Kepala Badan). The document is dated 2024 and includes the logo of the Ministry of Housing and Urban Development and Planning (KEMENPPU).

NO	URAIAN	HALAMAN
1	DAFTAR ISI	1
2	DAFTAR LAMPIRAN	2
3	DAFTAR GAMBAR	3
4	DAFTAR TABEL	4
5	DAFTAR LAMPIRAN	5
6	DAFTAR GAMBAR	6
7	DAFTAR TABEL	7
8	DAFTAR LAMPIRAN	8
9	DAFTAR GAMBAR	9
10	DAFTAR TABEL	10
11	DAFTAR LAMPIRAN	11
12	DAFTAR GAMBAR	12
13	DAFTAR TABEL	13
14	DAFTAR LAMPIRAN	14
15	DAFTAR GAMBAR	15
16	DAFTAR TABEL	16
17	DAFTAR LAMPIRAN	17
18	DAFTAR GAMBAR	18
19	DAFTAR TABEL	19
20	DAFTAR LAMPIRAN	20
21	DAFTAR GAMBAR	21
22	DAFTAR TABEL	22
23	DAFTAR LAMPIRAN	23
24	DAFTAR GAMBAR	24
25	DAFTAR TABEL	25
26	DAFTAR LAMPIRAN	26
27	DAFTAR GAMBAR	27
28	DAFTAR TABEL	28
29	DAFTAR LAMPIRAN	29
30	DAFTAR GAMBAR	30
31	DAFTAR TABEL	31
32	DAFTAR LAMPIRAN	32
33	DAFTAR GAMBAR	33
34	DAFTAR TABEL	34
35	DAFTAR LAMPIRAN	35
36	DAFTAR GAMBAR	36
37	DAFTAR TABEL	37
38	DAFTAR LAMPIRAN	38
39	DAFTAR GAMBAR	39
40	DAFTAR TABEL	40
41	DAFTAR LAMPIRAN	41
42	DAFTAR GAMBAR	42
43	DAFTAR TABEL	43
44	DAFTAR LAMPIRAN	44
45	DAFTAR GAMBAR	45
46	DAFTAR TABEL	46
47	DAFTAR LAMPIRAN	47
48	DAFTAR GAMBAR	48
49	DAFTAR TABEL	49
50	DAFTAR LAMPIRAN	50
51	DAFTAR GAMBAR	51
52	DAFTAR TABEL	52
53	DAFTAR LAMPIRAN	53
54	DAFTAR GAMBAR	54
55	DAFTAR TABEL	55
56	DAFTAR LAMPIRAN	56
57	DAFTAR GAMBAR	57
58	DAFTAR TABEL	58
59	DAFTAR LAMPIRAN	59
60	DAFTAR GAMBAR	60
61	DAFTAR TABEL	61
62	DAFTAR LAMPIRAN	62
63	DAFTAR GAMBAR	63
64	DAFTAR TABEL	64
65	DAFTAR LAMPIRAN	65
66	DAFTAR GAMBAR	66
67	DAFTAR TABEL	67
68	DAFTAR LAMPIRAN	68
69	DAFTAR GAMBAR	69
70	DAFTAR TABEL	70
71	DAFTAR LAMPIRAN	71
72	DAFTAR GAMBAR	72
73	DAFTAR TABEL	73
74	DAFTAR LAMPIRAN	74
75	DAFTAR GAMBAR	75
76	DAFTAR TABEL	76
77	DAFTAR LAMPIRAN	77
78	DAFTAR GAMBAR	78
79	DAFTAR TABEL	79
80	DAFTAR LAMPIRAN	80
81	DAFTAR GAMBAR	81
82	DAFTAR TABEL	82
83	DAFTAR LAMPIRAN	83
84	DAFTAR GAMBAR	84
85	DAFTAR TABEL	85
86	DAFTAR LAMPIRAN	86
87	DAFTAR GAMBAR	87
88	DAFTAR TABEL	88
89	DAFTAR LAMPIRAN	89
90	DAFTAR GAMBAR	90
91	DAFTAR TABEL	91
92	DAFTAR LAMPIRAN	92
93	DAFTAR GAMBAR	93
94	DAFTAR TABEL	94
95	DAFTAR LAMPIRAN	95
96	DAFTAR GAMBAR	96
97	DAFTAR TABEL	97
98	DAFTAR LAMPIRAN	98
99	DAFTAR GAMBAR	99
100	DAFTAR TABEL	100

Perjanjian Kinerja Revisi III (Akhir)

The image shows the cover page of the third revised Performance Agreement (Perjanjian Kinerja Revisi III) for 2024. It is titled 'PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024' and is signed by the Head of the Institution (Kepala Instansi) and the Head of the Agency (Kepala Badan). The document is dated 2024 and includes the logo of the Ministry of Housing and Urban Development and Planning (KEMENPPU).

NO	URAIAN	HALAMAN
1	DAFTAR ISI	1
2	DAFTAR LAMPIRAN	2
3	DAFTAR GAMBAR	3
4	DAFTAR TABEL	4
5	DAFTAR LAMPIRAN	5
6	DAFTAR GAMBAR	6
7	DAFTAR TABEL	7
8	DAFTAR LAMPIRAN	8
9	DAFTAR GAMBAR	9
10	DAFTAR TABEL	10
11	DAFTAR LAMPIRAN	11
12	DAFTAR GAMBAR	12
13	DAFTAR TABEL	13
14	DAFTAR LAMPIRAN	14
15	DAFTAR GAMBAR	15
16	DAFTAR TABEL	16
17	DAFTAR LAMPIRAN	17
18	DAFTAR GAMBAR	18
19	DAFTAR TABEL	19
20	DAFTAR LAMPIRAN	20
21	DAFTAR GAMBAR	21
22	DAFTAR TABEL	22
23	DAFTAR LAMPIRAN	23
24	DAFTAR GAMBAR	

2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa pencapaian target diukur melalui perbandingan antara realisasi terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berlaku terhadap pekerjaan fisik maupun penunjang di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan yang berada di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

2.4 Target Kinerja Tahun Pelaporan dalam Pemenuhan Target Renstra

2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra

Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan bidang perumahan yang merupakan program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menjalankan kegiatan yang terdiri dari kegiatan fisik penyelenggaraan penyediaan perumahan dan permukiman dan kegiatan penunjang berupa dukungan manajemen di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan dan permukiman.

Tabel 2.2 Target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menurut RENSTRA Tahun 2020-2024 dan Capaian Hingga Tahun 2023

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN TAHUN 2023
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni			
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	57 Laporan	27 Laporan
2.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	15.864 Unit	3.759 Unit

Lanjutan Tabel 2.2 Target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menurut RENSTRA Tahun 2020-2024 dan Capaian Hingga Tahun 2023

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN TAHUN 2023
3.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	75.217 Unit	47.613 Unit
4.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	453 Unit	37 Unit
5.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	3.340 Unit	763 Unit
6.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	111 Tower	19 Tower
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan			
1.	Layanan Perkantoran	20 Layanan	15 Layanan
2.	Layanan Umum	20 Layanan	15 Layanan
3.	Layanan Sarana Internal	20 Layanan	10 Layanan

Sumber: Rencana Strategis Balai P2P Sumatera V Tahun 2020-2024

Hingga tahun 2023, capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V sudah mencapai lebih dari 50,00%, namun terdapat jarak yang cukup jauh antara target dan capaian sehingga dibutuhkan upaya percepatan untuk dapat mencapai target pada Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Renstra

Di tahun 2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah merincikan target kinerja yang akan dicapai berdasarkan pada Renstra 2020-2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V yang dijelaskan sebagai berikut

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menurut RENSTRA Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni		
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	12 Laporan
2.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	5.552 Unit
3.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	19.890 Unit
4.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	120 Unit
5.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	911 Unit
6.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	28 Tower
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan		
1.	Layanan Perkantoran	4 Layanan
2.	Layanan Umum	4 Layanan
3.	Layanan Sarana Internal	4 Layanan

Sumber: Rencana Strategis Balai P2P Sumatera V Tahun 2020-2024

a. Wilayah I: Provinsi Sumatera Selatan

Adapun capaian output kegiatan tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Target Kinerja Balai di Provinsi Sumatera Selatan TA 2024

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 Laporan
	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	3.998 Unit
	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	11.250 Unit
	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	40 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	428 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	10 Tower
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Layanan Perkantoran	1 Layanan
	Layanan Umum	1 Layanan
	Layanan Sarana Internal	1 Layanan

Sumber : Rencana Strategis Balai P2P Sumatera V Tahun 2020-2024

b. Wilayah II: Provinsi Lampung

Adapun capaian output kegiatan tahun 2024 di Provinsi Lampung berdasarkan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Target Kinerja Balai di Provinsi Lampung TA 2024

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 Laporan
	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	1.333 Unit
	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	6.340 Unit
	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	40 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	309 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	12 Tower
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Layanan Perkantoran	1 Layanan
	Layanan Umum	1 Layanan
	Layanan Sarana Internal	1 Layanan

Sumber : Rencana Strategis Balai P2P Sumatera V Tahun 2020-2024

c. Wilayah II: Provinsi Kep. Bangka Belitung

Adapun capaian output kegiatan tahun 2024 di Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Target Kinerja Balai di Provinsi Kep. Bangka Belitung TA 2024

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 Laporan
	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	666 Unit
	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	2.300 Unit
	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	40 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	174 Unit
	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	8 Tower
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Layanan Perkantoran	1 Layanan
	Layanan Umum	1 Layanan
	Layanan Sarana Internal	1 Layanan

Sumber : Rencana Strategis Balai P2P Sumatera V Tahun 2020-2024

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB 3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), implementasi akuntabilitas kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023 telah dievaluasi. Evaluasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/IJ/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Implementasi atas AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023 dapat dikategorikan BB (Sangat Baik), yang menunjukkan bahwa akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dengan pencapaian 72,65 dengan rincian per komponen sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target Kinerja Dukungan Manajemen di Balai P2P Sumatera V TA 2024


No.	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,30
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,65
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	72,65

Berdasarkan pada hasil evaluasi tersebut, implementasi AKIP di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V belum mencapai nilai maksimal sehingga terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dan telah ditindaklanjuti, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.




Tabel 3.2 Tindak Lanjut atas Rekomendasi pada LHE Implementasi AKIP Tahun 2023

NO.	KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	DOKUMENTASI
1.	Perencanaan Kinerja	<p>Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja berikutnya (Renstra) periode akan datang dapat memperhatikan <i>deadline</i> dalam publikasi pada e-Sakip sesuai dengan Permen PUPR No. 9 Tahun 2018</p> <p>Dalam penyusunan Laporan Bulanan berikutnya dapat mencantumkan Capaian Kinerja PK secara detail untuk setiap IKK</p>	<p>Dokumen Perencanaan Kinerja telah di publikasikan tepat waktu sesuai dengan Permen PUPR No. 9 Tahun 2018 pada aplikasi e-Sakip Kementerian PUPR</p> <p>Pada laporan bulanan Balai telah dicantumkan capaian kinerja untuk setiap IKK</p>	 
2.	Pengukuran Kinerja	<p>Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja berikutnya (Renstra) agar mencantumkan Tata Cara Pengukuran Kinerja</p>	<p>Pada perencanaan dokumen selanjutnya akan ditambahkan tata cara pengukuran kinerja</p>	

Lanjutan Tabel 3.2 Tindak Lanjut atas Rekomendasi pada LHE Implementasi AKIP Tahun 2023

NO.	KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	DOKUMENTASI
2.	Pengukuran Kinerja	<p>Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala (Laporan Evaluasi dan Monev Bulanan) dapat menuangkan capaian Kinerja PK secara detail untuk setiap IKK</p> <p>Pengukuran Kinerja (SKP agar dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> (TUKIN 2024))</p>	<p>Pada laporan evaluasi dan monev bulanan Balai telah dicantumkan capaian kinerja untuk setiap IKK</p> <p>Pengukuran kinerja telah dijadikan sebagai dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i></p>	 
3.	Pelaporan Kinerja	<p>Pada Laporan Kinerja periode berikutnya ringkasan eksekutif agar menggambarkan capain Kinerja, maupun hal-hal penting lainnya</p>	<p>Telah dijelaskan mengenai capaian kinerja maupun hal-hal penting lain didalam laporan kinerja</p>	

Lanjutan Tabel 3.2 Tindak Lanjut atas Rekomendasi pada LHE Implementasi AKIP Tahun 2023

NO.	KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	DOKUMENTASI
3.	Pelaporan Kinerja	Pada Dokumen Laporan Kinerja berikutnya agar mencantumkan/ membandingkan target capaian kinerja secara total untuk setiap tahun pada periode Renstra	Dokumen laporan kinerja telah mencantumkan dan membandingkan target capaian kinerja secara total untuk setiap tahun pada periode Renstra	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan menuangkan hasilnya dalam Laporan Kinerja	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dituangkan pada Laporan Kinerja	
		Dalam mengimplementasikan SAKIP dapat mengacu pada Permen PUPR No. 9 Tahun 2018 dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP	SAKIP telah diimplementasikan dengan mengacu pada Permen PUPR No. 9 Tahun 2018 dan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP telah ditindaklanjuti	

3.2 Capaian Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan merupakan unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perumahan di tingkat daerah. Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V di tahun 2024 dilakukan dengan cara menghitung perbandingan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki 2 (dua) sasaran kinerja yaitu meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

Adapun dalam penentuan target, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi target kinerja, yaitu berdasarkan perjanjian kinerja/DIPA dan berdasarkan rencana strategis (Renstra). Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.3 Target Kinerja Balai P2P Sumatera V Tahun 2024

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Output/Indikator	Target Tahun 2024	
		RENSTRA	DIPA Revisi Akhir
Sasaran Strategis: Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau			
Sasaran Program: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni			
Program/Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni			
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni			
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	12 Laporan	3 Laporan
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	19.890 Unit	8.318 Unit
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	911 Unit	150 Unit
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	28 Tower	2 Tower
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	120 Unit	- Unit
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit	- Unit
7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	5.552 Unit	675 Unit
8.	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	- Laporan	3 Laporan
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
Program/Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan			
1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
2.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	4 Layanan
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan

3.2.1 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni

Salah satu sasaran program Direktorat Jenderal Perumahan adalah Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman. Hal ini didukung oleh sasaran kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V yaitu Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni. Kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan sasaran kegiatan ini merupakan kegiatan penyediaan perumahan layak huni melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan juga bantuan PSU bagi rumah umum MBR.

Selain dari kegiatan pembangun hunian baru, Direktorat Jenderal Perumahan juga bertanggung jawab pada perawatan dan pemeliharaan hunian yang telah dibangun sebelumnya namun belum diserahkan asetnya kepada penerima manfaat.

Adapun terkait capaian kinerja melalui kegiatan penyediaan akses perumahan layak huni dapat dibandingkan pada 2 (dua) dasar penentuan target, yaitu berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024 dan berdasarkan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Tahun 2020-2024.

a. Capaian Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Balai P2P Sumatera V Tahun 2024

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Output/Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis: Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau					
Sasaran Program: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni					
Program/Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni					
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 Laporan	3 Laporan	-	100,00
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	8.318 Unit	8.278 Unit	40 Unit	99,52
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	150 Unit	150 Unit	-	100,00
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	2 Tower	2 Tower	-	100,00
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	- Unit	- Unit	-	-
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit	- Unit	-	-
7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	675 Unit	675 Unit	-	100,00
8.	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	3 Laporan	3 Laporan	-	100,00
TOTAL					99,92

Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan sesuai dengan yang tercantum pada DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V tahun 2024, terdapat 8 (delapan) kategori sasaran/output yang diharapkan dapat dicapai oleh balai di tahun ini. Berdasarkan kategori tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V mendapatkan rata-rata sekitar 99,92% dan terdapat indikator dengan capaian yang tidak mencapai target yaitu pada jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di tahun 2024 ini.

b. Capaian Kegiatan berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Balai P2P Sumatera V Tahun 2024

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Output/Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis: Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau					
Sasaran Program: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni					
Program/Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni					
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	12 Laporan	3 Laporan	9 Laporan	25,00
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	19.890 Unit	8.278 Unit	11.612 Unit	41,62
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	911 Unit	150 Unit	761 Unit	16,47
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	28 Tower	2 Tower	26 Tower	7,14
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	120 Unit	- Unit	120 Unit	0,00
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit	- Unit	- Unit	0,00
7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	5.552 Unit	675 Unit	4.877 Unit	12,16
8.	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	- Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00
TOTAL					33,73

Berdasarkan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2020-2024, terdapat 8 (delapan) kategori sasaran/output yang harus dicapai oleh balai. Di tahun 2024, target menurut Renstra tersebut hanya mampu mencapai rata-rata 33,73% meningkat dari capaian pada tahun sebelumnya yang mencapai 18,57%.

Wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V terbagi atas 3 (tiga) yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penjabaran secara detail mengenai penyelenggaraan masing-masing kegiatan di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dalam upaya meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dijelaskan sebagai berikut.

a. Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat dan Daerah

Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat dan Daerah di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah dilaksanakan dan memiliki realisasi capaian 100,00%. Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat dan Daerah diimplementasikan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan diantaranya:

- Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah

Pelaksanaan sinkronisasi program pusat dan daerah dilaksanakan 2 (dua) kali dalam bentuk Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PKP dan Sinkronisasi Program Perumahan yang dibagi berdasarkan provinsi wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Rapat pertama dilaksanakan di Kota Palembang pada tanggal 16-17 Mei 2024 untuk Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 5-7 Juni 2024 di Kota Bandar Lampung untuk Provinsi Lampung. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi Pokja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Daerah demi mendukung Pengembangan RP3KP dan Basis Data PKP serta Penyelenggaraan Sinkronisasi dan Koordinasi Program Perumahan di Pusat dan Daerah TA. 2025-2029.

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan penyelenggaraan perumahan di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas pembangunan perumahan sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

b. Penerapan Manajemen Risiko, Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

- Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen secara komprehensif telah diatur pedoman manajemen risiko dalam SE Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR dan dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi dengan prinsip menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko, menjaga kualitas data terkait risiko dan efektivitas pelaporan. Penerapan manajemen risiko pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V pada tahun 2024 telah direalisasikan dengan capaian hingga 100,00% dari target.

- **Pembangunan Zona Integritas**

Pembangunan zona integritas bertujuan Untuk memperoleh hasil pelaksanaan kepatuhan yang sesuai dengan aturan, baik secara kualitas pekerjaan maupun kepatuhan pegawai ASN sesuai kode etik dan kode perilaku di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan. Pada tahun 2024, pembangunan zona integritas pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah dilaksanakan dengan capaian 100,00% dan telah dilaporkan secara berkala.

- **Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)**

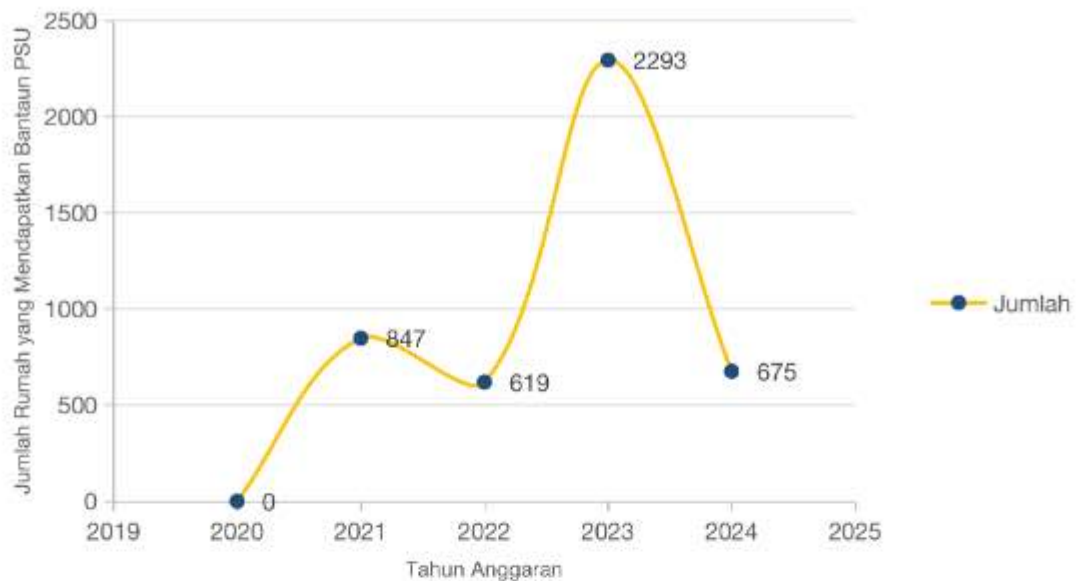
Pada tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 merupakan salah satu wujud komitmen manajemen dalam upaya mencegah, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Di tahun 2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V melanjutkan kegiatan dengan pelaksanaan *surveillance* pada Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang telah didapatkan pada tahun sebelumnya. Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah mencapai 100,00%.

c. Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial

Program Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di tahun 2015-2020, kewenangan penyelenggaraan kegiatan ini masih secara penuh dikendalikan dari Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK) dan satker strategis di pusat. Namun kewenangan tersebut sudah meluas di tahun 2021 hingga tahun 2024, dimana setiap satuan kerja di wilayah kerja Balai berkesempatan untuk menyelenggarakan Bantuan PSU ini secara langsung.

Selama tahun 2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V melaksanakan verifikasi pada penerima bantuan PSU perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk tahun 2025. Selain itu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V melaksanakan fasilitasi pada Serah Terima Aset pada pembangunan PSU ditahun-tahun sebelumnya dan melaksanakan koordinasi pendataan Program Sejuta Rumah (PSR). Sedangkan pelaksanaan pembangunan fisik bantuan PSU perumahan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan.

Di tahun 2024, terdapat 675 unit rumah MBR yang mendapatkan manfaat Bantuan PSU berupa jalan lingkungan di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Jumlah ini tentunya belum mampu menyentuh target maksimal Balai, namun menjadi langkah awal yang mampu diperhitungkan pada kegiatan ini.



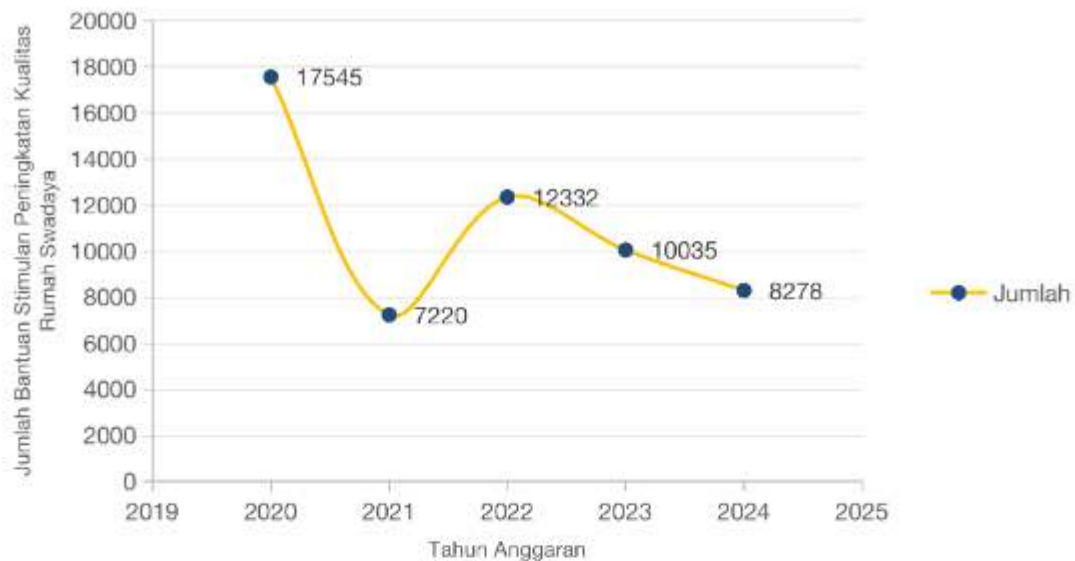
KEGIATAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	847	619	2.293	675

Grafik 3.1 Penyelenggaraan Bantuan PSU bagi Rumah Umum MBR BP2P Sumatera V TA 2020-2024

Pada tahun 2023-2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V melaksanakan kegiatan *Pilot Project* pembangunan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) yang berfokus pada masyarakat sektor informal berupa program kolaborasi *multistakeholder* perumahan dengan menggunakan dukungan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pembangunan RITTA sebanyak 100 unit yang terdiri dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Sarana Multigriya Finansial sebanyak 30 unit, PT. Bank Syariah Indonesia sebanyak 10 unit dan PT. Bank Tabungan Negara sebanyak 60 unit. Bantuan RITTA adalah rumah dengan tipe 18 unit dengan biaya sebesar Rp. 35.000.000,- per rumah.

d. Penyelenggaraan Rumah Swadaya

Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Swadaya atau yang dikenal dengan nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Perumahan. Hal ini terutama dikarenakan kegiatan ini berhubungan langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaannya. Selain itu karena tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk menuntaskan permasalahan rumah tidak layak huni yang masih menjadi PR besar dalam bidang perumahan dan permukiman di Indonesia.



KEGIATAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	17.545	7.130	12.332	10.045	8.278

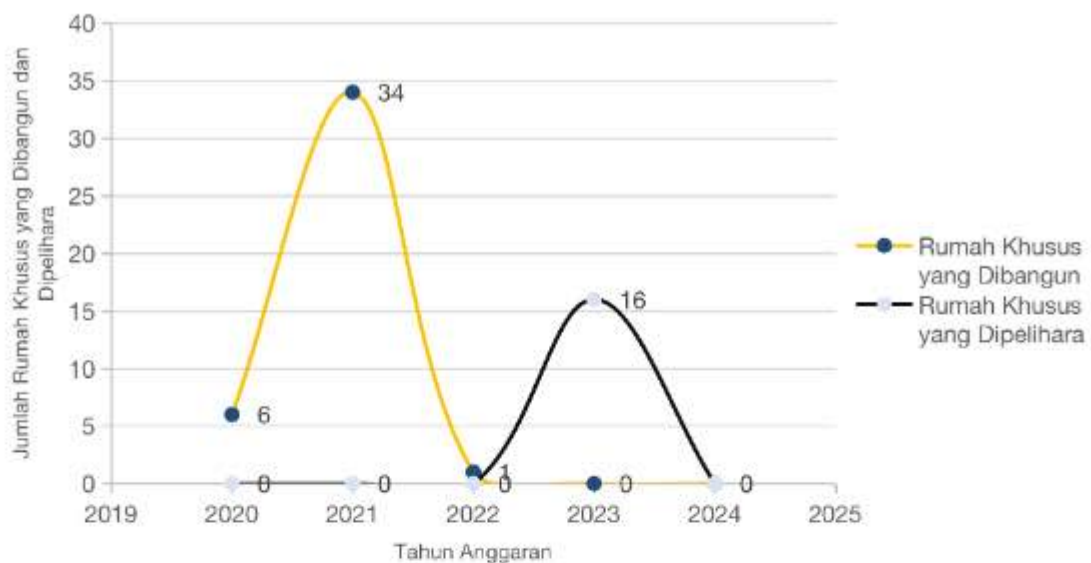
Grafik 3.2 Penyelenggaraan Perumahan Melalui Rumah Swadaya BP2P Sumatera V TA 2020-2024

Program BPS di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V sampai di tahun 2020 memiliki jumlah capaian dengan total 17.545 unit. Namun, capaian menurun di tahun 2021 dengan total bantuan sebanyak 7.130 unit. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 sebanyak 12.332 unit. Kemudian pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan dengan capaian yang mencapai 10.045 unit dan 8.278 unit.

Selain pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V melaksanakan fasilitasi Klinik Rumah Swadaya (KRS). Capaian pada pelaksanaan fasilitasi KRS pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah melebihi dari target yang telah ditentukan.

e. Penyelenggaraan Rumah Khusus

Penyelenggaraan rumah khusus di Balai Pelaksana Penyediaan Sumatera V memiliki jumlah yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 hanya terdapat 6 unit bantuan rumah khusus dan kemudian meningkat pada tahun 2021 sebanyak 34 unit bantuan pembangunan rumah khusus. Pada tahun 2022 hanya terdapat 1 unit rumah khusus yang dibangun dan tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat pembangunan rumah khusus. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, melakukan pemerliharan pada 16 unit rumah khusus di tahun 2023.



KEGIATAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	6	34	1	-	-
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	--	-	-	16	-

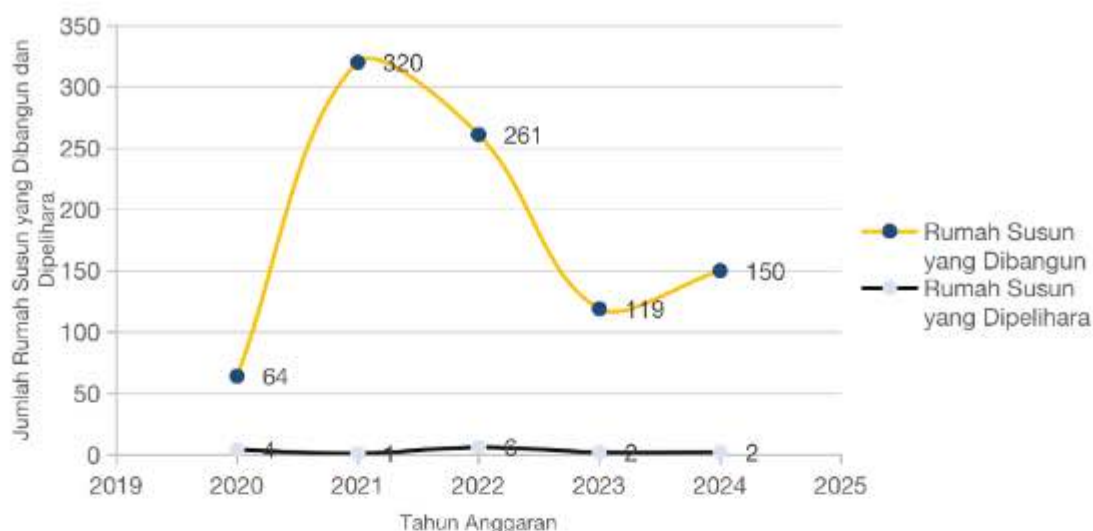
Grafik 3.3 Penyelenggaraan Perumahan Melalui Rumah Khusus BP2P Sumatera V TA 2020-2024

Faktor terbesar yang memengaruhi kurangnya tren pada penyelenggaraan rumah khusus ini adalah adanya perubahan kriteria prioritas penerima manfaat dalam usulan rumah khusus.

Berdasarkan urgensi perubahan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus, target prioritas rumah khusus saat ini dititikberatkan pada penerima manfaat yang terdampak bencana (skala nasional), terdampak program pemerintah, masyarakat daerah perbatasan, dan/atau masyarakat di pulau terluar, daerah terpencil, dan tertinggal (3T). Berdasarkan pada kriteria tersebut, wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V hampir tidak bersinggungan dengan target prioritas ini sehingga usulan rumah khusus di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V ini tidak dapat secara mudah dipenuhi.

f. Penyelenggaraan Rumah Susun

Sejak tahun 2020, pembangunan di bidang rumah susun mengalami penurunan akibat terkena dampak *refocussing* anggaran secara nasional oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga banyak penyelenggaraan pembangunan yang dianggarkan menjadi tahun jamak. Di tahun 2024, jumlah capaian rumah susun mengalami penurunan dan capaian pembangunan rumah susun diangka 150 unit.



KEGIATAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	64	320	261	119	150
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Tower	4	1	6	2	2

Grafik 3.4 Penyelenggaraan Perumahan Melalui Rumah Susun BP2P Sumatera V TA 2020-2024

Sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan rumah susun, mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan oleh proses serah terima aset rumah susun ke penerima manfaat di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V mengalami percepatan, namun pada tahun 2024, Balai sudah melaksanakan pendataan pada rumah susun yang akan diusulkan untuk menjadi prioritas OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi).

3.2.2 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas Dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan

Sasaran lain yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Perumahan sesuai dengan visi dan misi Kementerian PUPR adalah Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Hal ini didukung oleh sasaran kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

Indikator kegiatan dalam pemenuhan sasaran kegiatan ini diantaranya adalah terwujudnya 3 (tiga) layanan dukungan manajemen satker yaitu Layanan Perkantoran, Layanan Umum, dan Layanan Sarana Internal. Adapun target output capaian kinerja pada kegiatan ini memiliki perbedaan sesuai dengan dasar penentuan target. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel capaian kegiatan di bawah ini.

a. Capaian Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.6 Target Kinerja Balai P2P Sumatera V Tahun 2024

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Output/Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya					
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
Program/Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan					
1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	-	100,00
2.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	4 Layanan	-	100,00
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan	-	100,00
TOTAL					100,00

b. Capaian Kegiatan berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Balai P2P Sumatera V Tahun 2024

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Outcome)/Output/Indikator	Target	Realisasi	Deviasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya					
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
Program/Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan					
1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4 Layanan	1 Layanan	3 Layanan	25,00
2.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	4 Layanan	-	100,00
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan	-	100,00
TOTAL					75,00

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maupun Renstra Tahun 2020-2024, capaian Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V pada kegiatan memiliki realisasi mencapai 75,00% dari target Renstra pada tahun 2024.

3.3 Analisis Perbandingan Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Sumatera V. Tujuan ini dilaksanakan dengan memenuhi sasaran kinerja yaitu menyelenggarakan penyediaan perumahan yang layak huni, aman, dan terjangkau melalui diantaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Susun, Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Khusus, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, dan memberikan Bantuan PSU bagi perumahan umum milik MBR.

3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dimulai pada saat pembentukan balai di tahun 2020. Namun, pada tahun 2020, DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V masih bergabung dengan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan sehingga target pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dimulai pada tahun 2021. Target dan capaian pada tahun sebelumnya merupakan capaian pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V cukup banyak perubahan dikarenakan kondisi pada saat setiap tahunnya baik program dan kegiatan hingga penganggaran.

Perbandingan capaian pada tahun 2015 hingga 2024 pada wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 3.8 Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2015-2024

KEGIATAN	SATUAN	TAHUN										TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	-	3	9	9	7	12	6	6	6	3	61
Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	-	-	-	-	-	847	619	2.293	675	4.434
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	-	6.172	7.659	13.447	11.996	17.545	7.220	12.332	10.035	8.278	94.684
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	-	218	150	150	100	6	34	1	-	-	659
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	2	-	-	-	-	-	16	-	18
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	-	302	406	469	156	64	320	261	119	150	2.247
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	-	3	11	6	13	4	1	6	2	2	48
Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V												
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	-	-	-	-	-	3	3	3	3	2	14
Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN												
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	-	-	3	3	2	3	1	1	1	-	14
Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	-	-	-	-	-	340	250	878	397	1.865
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	-	2.989	2.659	5.847	4.179	7.200	4.092	6.992	4.861	4.776	43.595

Lanjutan Tabel 3.8 Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2015-2024

KEGIATAN	SATUAN	TAHUN										TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN												
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	-	-	100	-	25	3	3	1	-	-	132
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	-	110	108	195	36	-	197	96	75	86	903
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	-	-	5	3	7	1	1	2	2	2	23
SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI LAMPUNG												
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	-	-	3	3	3	3	1	1	1	1	16
Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	-	-	-	-	-	150	60	554	84	848
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	-	2.000	3.000	5.600	5.588	7.900	2.289	4.440	4.334	3.015	38.166
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	-	112	50	100	75	3	31	-	-	-	371
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	-	192	298	190	120	43	123	151	-	32	1.149
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	-	2	2	3	3	2	-	4	-	-	16
SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG												
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	-	3	3	3	2	3	1	1	1	-	17
Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	-	-	-	-	-	357	309	861	194	1.721
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	-	1.183	2.000	2.000	2.229	2.445	839	900	840	487	12.923

Lanjutan Tabel 3.8 Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2015-2024

KEGIATAN	SATUAN	TAHUN										TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
SATKER PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG												
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	-	106	-	50	-	-	-	-	-	-	156
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	-	-	-	84	-	21	-	14	44	32	195
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	-	1	4	-	3	1	-	-	-	-	9

3.3.2 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V tidak tetap. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan, salah satu kendala terbesar adalah dengan adanya Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penganggaran untuk pelaksanaan pembangunan berkurang dan dialihkan untuk penanganan Pandemi *Covid-19*. Sehingga pada tahun-tahun selanjutnya output capaian kinerja cenderung menurun. Pada tahun 2023 hingga tahun 2024 terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan output capaian kinerja dengan pelaksanaan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* bidang perumahan.

Selama ini, kinerja capaian didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Target yang direncanakan pada Renstra 2020-2024 bersifat progresif setiap tahunnya namun pada pelaksanaannya, capaian cenderung menurun. Sehingga terdapat jarak antara target dan capaian yang cukup besar pada kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2020-2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

Perbandingan target dan capaian selama periode 2020 hingga 2024 terhadap Renstra 2020-2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dengan Target Renstra 2020-2024

KEGIATAN	SATUAN	TAHUN										TOTAL		GAP
		2020		2021		2022		2023		2024		Target	Realisasi	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	9	9	12	6	12	6	12	6	12	3	57	30	27
Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	-	-	2.500	847	3.437	619	4.725	2.293	5.552	675	16.214	4.434	11.780
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	18.437	15.100	8.140	10.130	11.520	12.332	17.230	10.045	19.890	8.278	75.217	55.885	19.332
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	3	3	90	33	120	1	120	-	120	-	453	37	416
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	64	63	450	320	871	261	1.044	119	911	150	3.340	913	2.427
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	11	10	10	1	29	6	33	2	28	2	111	21	90
Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	4	1	4	4	4	4	4	1	4	1	20	11	9
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	20	19	1
Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	20	19	1

3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja pada Unit yang Selevel

Realisasi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V pada tahun 2024 mencapai 99,95%. Jika dibandingkan dengan unit kerja selevel seperti Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV tahun capaian kinerja tidak jauh berbeda yaitu 99,94%. Perbedaan capaian terdapat pada indikator Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV mencapai 99,45% sedangkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V mencapai 99,52%. Namun capaian baik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV maupun Sumatera V menurun dari capaian pada sebelumnya.

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Balai P2P Sumatera V dengan Unit yang Selevel

No.	Indikator Kinerja	Balai P2P Sumatera V			Balai P2P Sumatera IV		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 Laporan	3 Laporan	100,00	3 Laporan	3 Laporan	100,00
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	8.318 Unit	8.278 Unit	99,52	8.234 Unit	8.189 Unit	99,45
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	159 Unit	159 Unit	100,00	85 Unit	85 Unit	100,00
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	2 Tower	2 Tower	100,00	4 Tower	4 Tower	100,00
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-	140 Unit	140 Unit	100,00
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-	-	-	-
7.	Jumlah Rumah Umum yang Mendapatkan Fasilitas Layanan Bantuan PSU	675 Unit	675 Unit	100,00	570 Unit	570 Unit	100,00
8.	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	3 Laporan	3 Laporan	100,00	3 Laporan	3 Laporan	100,00
9.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00	1 Layanan	1 Layanan	100,00
10.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	4 Layanan	100,00	4 Layanan	4 Layanan	100,00
11.	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan	100,00	4 Layanan	4 Layanan	100,00
				99,95			99,94

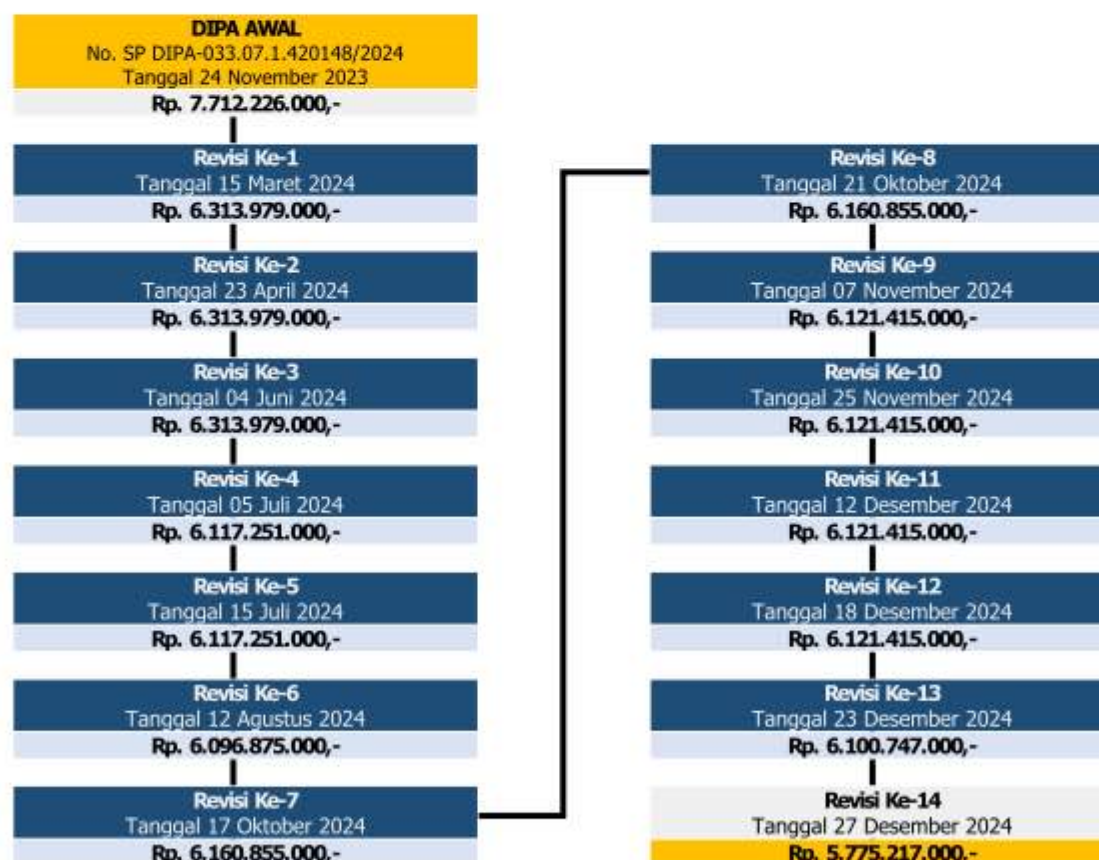
3.4 Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Di lingkungan kementerian, DIPA yang digunakan baik oleh pemerintah pusat maupun unit kerja/pelaksana teknis di daerah, dianggarkan melalui anggaran APBN.

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya terhitung sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember di tahun anggaran tersebut dianggarkan.

Sepanjang tahun 2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah melakukan revisi DIPA sebanyak 14 (empat belas) kali. Perubahan terhadap DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V selama tahun 2024 dapat dilihat melalui bagan di bawah ini.



Gambar 3.1 Bagan Alur Perubahan DIPA Balai P2P Sumatera V Tahun 2024

3.4.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA Revisi Ke-14 tanggal 27 Desember 2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V memiliki anggaran total sebesar Rp. 5.775.217.000,-. Hingga bulan Desember 2023, anggaran yang berhasil diserap oleh balai adalah sebesar Rp. 5.463.570.000,- atau sekitar 94,60% dari target.

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Hingga Akhir Desember Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN /OUTPUT	VOL	SATUAN	PAGU	REALISASI	KEUANGAN		FISIK	
				(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Penyediaan Akses Rumah Layak Huni									
1.	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan/Kajian		2.555.148	2.465.431	100,00	96,49	100,00	100,00
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan									
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan/Laporan / Dokumen		2.961.239	2.822.411	100,00	95,31	100,00	100,00
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit/m2/Paket		258.830	175.728	100,00	67,89	100,00	100,00
TOTAL				5.775.217	5.463.570	100,00	94,60	100,00	100,00

a. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana

Kebijakan bidang sarana dan prasarana merupakan salah satu kegiatan dalam program perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Di tahun 2024, dianggarkan sebesar Rp.2.555.148.000,- untuk pelaksanaan kegiatan yang menunjang kebijakan bidang sarana dan prasarana. Nilai anggaran yang diserap oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V hingga akhir Desember 2024 adalah sebesar Rp.2.465.431.000,- yang digunakan pada kegiatan dijelaskan sebagai berikut.

1. Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat - Daerah

- Sinkronisasi Program Perumahan Pusat - Daerah

Kegiatan sinkronisasi program perumahan pusat-daerah merupakan ajang menjaring usulan program perumahan T-2 dari daerah ke pusat. Selain itu, dilaksanakan juga kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PKP berhubungan dengan kegiatan Pokja dan Forum PKP. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah Sinkronisasi Basis Data PKP, Finalisasi Basis Data PKP, dan rapat-rapat rutin Pokja dan Forum PKP. Realisasi anggaran pada kegiatan sinkronisasi program perumahan pusat-daerah adalah 98,62% senilai Rp. 1.000.186.000,- dari pagu anggaran Rp. 1.014.163.000,-.

- **Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan pada Balai berguna untuk memeriksa kebenaran data usulan yang telah disampaikan oleh pengusul atau usulan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan. Sedangkan kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan penyediaan perumahan yang sudah atau sedang terlaksana. Realisasi anggaran pada kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan adalah 98,68% senilai Rp. 675.541.000,- dari pagu anggaran Rp. 684.586.000,-.

2. Penerapan Manajemen Risiko, Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

- **Penerapan Manajemen Risiko**

Dalam upaya dukungan pelaksanaan manajemen tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan khususnya dalam hal pembinaan kepatuhan intern pelaksanaan penyelenggaraan perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V melaksanakan penerapan manajemen risiko. Manajemen Risiko dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi dengan prinsip menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko, menjaga kualitas data terkait risiko dan efektivitas pelaporan. Realisasi anggaran pada kegiatan penerapan manajemen risiko adalah 98,68% senilai Rp. 66.611.000,- dari pagu anggaran Rp. 66.640.000,-.

- **Pembangunan Zona Integritas**

Dalam pelaksanaan kepatuhan yang sesuai dengan aturan, baik secara kualitas pekerjaan maupun kepatuhan pegawai ASN sesuai kode etik dan kode perilaku di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, dilaksanakan salah satu kegiatan pendukung yaitu pembangunan Zona Integritas (ZI). Realisasi anggaran pada kegiatan pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah 100,00% senilai Rp. 42.577.000,-.

- **Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)**

Berdasarkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022, Direktorat Jenderal Perumahan melakukan pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan yang merupakan salah satu wujud komitmen manajemen dalam upaya mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Realisasi anggaran pada kegiatan pelaksanaan SMAP adalah 97,36% senilai Rp. 101.701.000,- dari pagu anggaran Rp. 104.458.000,-.

3. Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial

- Verifikasi Bantuan Pembangunan PSU Perumahan Bagi MBR Tahun Anggaran 2025, Fasilitas Serah Terima Aset serta Koordinasi Pendataan PSR

Penjaringan usulan dilaksanakan guna menginformasikan bantuan kepada pengembang dan *stakeholder* bidang perumahan agar usulan bantuan PSU Perumahan dapat maksimal, sedangkan verifikasi data dilaksanakan guna memvalidasi data usulan Bantuan PSU Perumahan yang telah disampaikan dan lolos seleksi administrasi pada sistem aplikasi SIBARU dan kegiatannya akan dianggarkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Realisasi anggaran pada kegiatan penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial (RUK) adalah 94,66% senilai Rp. 142.554.000,- dari pagu anggaran Rp. 150.600.000,-.

4. Penyelenggaraan Rumah Swadaya

- Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) Bantuan Rumah Swadaya

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Direktorat Rumah Swadaya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Realisasi anggaran pada kegiatan verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) bantuan rumah swadaya adalah 63,62% senilai Rp. 96.120.000,- dari pagu anggaran Rp. 151.092.000,-.

- Fasilitas Klinik Rumah Swadaya

Dalam mendukung pelaksanaan peningkatan rumah secara swadaya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V melaksanakan kegiatan Klinik Rumah Swadaya (KRS) sebagai salah satu fasilitas bagi masyarakat yang sedang atau akan membangun rumah. Realisasi anggaran pada kegiatan fasilitas Klinik Rumah Swadaya (KRS) adalah 99,67% senilai Rp. 230.129.000,- dari pagu anggaran Rp. 230.900.000,-.

5. Penyelenggaraan Rumah Khusus

- Verifikasi Lokasi Bantuan Rumah Khusus Serah Terima Aset

Kegiatan rumah khusus di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V diantaranya pelaksanaan verifikasi lokasi bantuan dan serah terima aset. Pada tahun ini, difokuskan pada pelaksanaan percepatan serah terima aset dikarenakan tidak adanya rencana pembangunan rumah khusus diwilayah Balai. Realisasi anggaran pada kegiatan verifikasi lokasi bantuan rumah khusus Serah Terima Aset (STA) adalah 99,85% senilai Rp. 13.512.000,- dari pagu anggaran Rp. 13.532.000,-.

6. Penyelenggaraan Rumah Susun

- Verifikasi Lokasi Bantuan Rumah Susun Perencanaan Pemeliharaan Perawatan Rumah Susun

Dalam penyediaan rumah susun terdapat beberapa kegiatan lain selain pembangunan rumah susun diantaranya verifikasi lokasi bantuan rumah susun yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya baik dari segi mutu dan waktu. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pemeliharaan dan perawatan rumah susun serta survei dan verifikasi teknik usulan bantuan pembangunan rumah susun. Realisasi anggaran pada kegiatan verifikasi lokasi bantuan rumah susun perencanaan pemeliharaan perawatan rumah susun adalah 99,90% senilai Rp. 96.499.000,- dari pagu anggaran Rp. 96.600.000,-.

b. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

Selain memenuhi sasaran dalam penyediaan akses rumah layak huni, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya guna mendukung kinerja. Dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya:

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Anggaran yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V untuk layanan dukungan manajemen internal ini di tahun 2024 adalah sebesar Rp.2.961.239.000,- dan yang terserap hingga Desember 2024 adalah sebesar Rp.2.822.411.000,-.

Anggaran layanan ini digunakan dalam menunjang berbagai kegiatan diantaranya Layanan Umum Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Anggaran yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V untuk layanan sarana dan prasarana internal ini di tahun 2024 adalah sebesar Rp.258.830.000,- dan yang terserap hingga Desember 2024 adalah sebesar Rp.175.728.000,-.

Anggaran layanan ini digunakan dalam menunjang berbagai kegiatan diantaranya pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa pengadaan alat pengolahan data dan pengadaan peralatan dan fasilitas kantor.

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya

Berikut perbandingan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 dengan tahun anggaran 2024 pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)
Penyediaan Akses Rumah Layak Huni					
1.	Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat dan Daerah	2.779.157	2.746.326	1.698.749	1.675.728
2.	Penerapan Manajemen Risiko, Zona Integritas dan SMAP di Direktorat Jenderal Perumahan	283.246	222.839	213.675	210.889
3.	Penyusunan Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial	346.765	329.119	150.600	142.554
4.	Penyusunan Perencanaan Teknis Rumah Swadaya	535.045	532.207	381.992	326.249
5.	Penyusunan Perencanaan Teknis Rumah Khusus	-	-	13.532	13.512
6.	Penyusunan Perencanaan Teknis Rumah Susun	748.890	698.824	96.600	96.499
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan					
7.	Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)	-	-	72.814	70.202
8.	Layanan Umum Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	317.383	278.140	140.474	140.470
9.	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Perumahan	129.300	127.300	71.368	71.365
10.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.553.371	2.514.015	2.676.583	2.540.373
11.	Pengadaan Kendaraan Bermotor	-	-	35.000	33.520
12.	Pengadaan Perangkat Pengelola Data, Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	506.250	477.016	223.830	142.208
TOTAL		8.199.407	7.925.787	5.775.217	5.463.570
PERSENTASE CAPAIAN		99,66%		94,60%	

Realisasi anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V pada tahun 2024 menurun dari tahun 2023. Pada tahun 2024, realisasi anggaran mencapai Rp. 5.463.570.000,- dengan persentase 94,60% yang menurun dari tahun 2023 senilai Rp. 7.925.787.000,- dan persentase 99,66% dengan perbedaan 5,06%. Pengurangan pada anggaran dikarenakan adanya pergeseran anggaran yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan bencana.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.5.1 Sumber Daya Manusia

Berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024. Rasio penugasan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Penugasan} = (5/\text{Total Pegawai}) \times \text{Jumlah Kegiatan}$$

Tabel 3.13 Rasio Penugasan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

No	Unit Kerja/Satker	Pagu (Rp. Ribu)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pegawai	Rasio Penugasan /Orang	Pagu (Rp. Ribu)/Orang
1.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	5.775.217	5	33	0,76	175.006
2.	Satker PP Provinsi Sumatera Selatan	140.352.924	6	40	0,75	3.508.823
3.	Satker PP Provinsi Lampung	73.821.401	6	29	1,03	2.545,565
4.	Satker PP Provinsi Kep. Bangka Belitung	21.364.987	5	22	1,13	971.135
JUMLAH		241.314.529	22	124		

Berdasarkan tabel rasio penugasan diatas, diasumsikan 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh 5 orang maka rasio penugasan untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V adalah 1 penugasan. Namun, di masing-masing Satuan Kerja rasio penugasan masih diatas 1 penugasan. Maka dari itu diperlukan pendistribusian ulang jumlah pegawai ataupun penambahan pegawai pada bidang tersebut untuk menjaga keseimbangan beban kerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dan masing-masing Satuan Kerja. Selain itu, terdapat permasalahan lain yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V diantaranya:

1. Kurangnya pegawai bidang teknis dan administrasi sehingga beberapa pegawai harus memiliki beban kerja ganda; dan
2. Ketidakseimbangan jumlah pegawai dengan jumlah kegiatan yang membuat beban kinerja yang harus ditanggung oleh pegawai melebihi standar.

3.5.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V diantaranya:

1. Bangunan kantor pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di Jalan Inspektur Yazid No. 4290 KM 2,5 Kota Palembang. Terletak di lantai 1 pada bangunan 2 lantai dengan luas keseluruhan 328m².

Tabel 3.14 Analisis Kebutuhan Ruang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

PERUNTUKAN RUANG	LUAS RUANG	JUMLAH ORANG	TOTAL KEBUTUHAN RUANG (m ²)
Ruang Kepala Balai	117	1	117
Ruang Kasubbag Umum dan Tata Usaha	11	1	11
Ruang Kasi Wilayah I	11	1	11
Ruang Kasi Wilayah II	11	1	11
Ruang PPK Satker Balai	11	1	11
Ruang Staf	5	28	140
Ruang Rapat	73	-	73
Ruang Penyimpanan (Gudang)	24	-	24
Ruang Pelayanan Publik	20	-	20
Lobby dan Fasilitas Lain	50	-	50
Sirkulasi	25%		117
TOTAL			585

Setelah dilakukan analisis kebutuhan ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V membutuhkan luas ruangan dengan ukuran 585,00m² untuk dapat menampung 33 orang pegawai.

2. Ketersediaan dan pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2024, sudah memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dan juga mendukung kinerja Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja

3.6.1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja

Sebagai upaya dalam menyajikan informasi realisasi kinerja yang sesuai dengan kondisi terkini, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, melakukan penandatanganan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan para Kepala Satuan Kerja di wilayah kerja balai yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga disusun Berita Acara Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V yang memuat perbandingan target akhir dan capaian kinerja hingga tanggal 31 Desember 2024 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai dan para Kepala Satuan Kerja.

3.6.2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja

Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Kep. Bangka Belitung telah mengikuti Bimbingan Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 12-14 Desember 2024. Pada kegiatan ini pegawai mendapatkan informasi terkait capaian kinerja dan konsep penyusunan laporan kinerja tahun 2024. Selain itu, terus dilakukan koordinasi dengan para pegawai mengenai capaian kinerja baik di balai maupun capaian pada satuan kerja yang merupakan bagian dari capaian balai.

3.6.3 Analisis Penyesuaian Aktivitas untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala

Selama tahun 2024, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V menyelenggarakan rapat bulanan. Pada rapat tersebut, dibahas mengenai beberapa hal dan salah satunya adalah mengenai progres pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada capaian kinerja. Rapat ini dihadiri oleh staf Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Kep. Bangka Belitung, yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring).

3.6.4 Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala

Pada tahun 2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V telah melaksanakan revisi anggaran sebanyak 14 kali. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan anggaran yang perlu disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pagu anggaran awal yang tercantum pada DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V tanggal 23 November 2023 adalah sebesar Rp.7.712.226.000,- yang hingga revisi akhir mencapai Rp. Rp. 5.775.217.000,-.

3.6.5 Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja

Indikator pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V saat ini dibandingkan dengan 2 (dua) target kinerja yaitu berdasarkan pada target jangka pendek yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya dan target jangka menengah pada Renstra 2020-2024. Bila dilihat dari capaian kinerja balai pada tahun-tahun sebelumnya, kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V berhasil mencapai target berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun berjalan namun belum dapat mencapai target sesuai dengan Renstra 2020-2024. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara target Renstra 2020-2024 dengan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

3.6.6 Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja

Berdasarkan pada hasil evaluasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, terdapat beberapa rekomendasi penyesuaian pada dokumen perencanaan. Salah satu rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut adalah mencantumkan Tata Cara Pengukuran Kinerja pada dokumen perencanaan. Rekomendasi ini akan menjadi salah satu catatan dalam penyusunan dokumen kinerja ditahun selanjutnya.

3.6.7 Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja

Selama tahun 2024, dilaksanakan rapat bulanan yang membahas mengenai beberap hal, salah satunya mengenai pelaksanaan dan capaian kinerja pada balai serta satuan kerja. Pada kegiatan-kegiatan yang memerlukan perhatian khusus, dilaksanakan rapat tersendiri yang membahas lebih detail mengenai permasalahan dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Koordinasi antara balai dan satuan kerja terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan capaian kinerja.

PENUTUP

BAB 4

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

Selama tahun anggaran 2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang didasarkan pada DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Nomor: SK-DIPA 033.07.1.420148/2023 yang dituangkan didalam Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024. Selain itu, terdapat pula target kinerja jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V 2020-2024. Berdasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, di tahun 2024, capaian kinerja mencapai 99,92%. Capaian kinerja ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 102,51%. Capaian kinerja ini juga ditetapkan didalam Berita Acara Kesepakatan Capaian Output Tahun 2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.

Beberapa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V tahun 2024, diantaranya:

1. Terlaksananya kegiatan peningkatan penyediaan rumah layak huni yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V diantaranya pembangunan dan pemeliharaan rumah susun, pembangunan fasilitas bantuan PSU serta pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko;
2. Terlaksananya kolaborasi antara stakeholder pada *Pilot Project* Pembangunan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) di Kota Prabumulih;
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V secara berkala baik melalui kunjungan langsung ke lapangan ataupun secara daring berkenaan dengan keterbatasan waktu dan anggaran serta jarak tempuh ke lokasi yang cukup jauh;
4. Koordinasi dengan berbagai *stakeholder* bidang perumahan terutama Pemerintah Daerah, pelaksana pembangunan, pengembang perumahan dan masyarakat selama pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perumahan; dan
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pada kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

4.1.2 Faktor Penyebab Kegagalan

Berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Capaian Output Tahun 2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, terdapat 1 (satu) kegiatan yang belum mencapai target berdasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan capaian 8.278 unit dari target sebanyak 8.318 unit dengan persentase 99,52%. Hal ini disebabkan oleh adanya karena pengunduran diri dari Penerima Bantuan pada kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga adanya pengembalian dana ke kas negara namun output telah terhitung. Selain itu terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, diantaranya:

1. Minimnya koordinasi dengan *stakeholder* diluar bidang perumahan yang juga dapat membantu pelaksanaan kegiatan bidang perumahan seperti perusahaan BUMN atau swasta yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*; dan
2. Minimnya kegiatan sosialisasi bidang perumahan yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V sehingga beberapa *stakeholder* bidang perumahan tidak mengetahui adanya kegiatan, seperti beberapa pengembang yang belum mengetahui adanya kegiatan bantuan pembangunan PSU bagi rumah umum; dan
3. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V masih terbatas yang menyebabkan adanya pegawai dengan tugas ganda.

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Di tahun yang akan datang, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan mengharapkan agar penyelenggaraan perumahan di lingkungan Balai akan lebih berjalan dengan lebih baik lagi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dari dalam dan ke luar lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, khususnya kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) serta mengoptimalkan pengelolaan dan proses menggali potensi SDM di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V; dan
3. Membuat terobosan-terobosan baru di bidang penyelenggaraan perumahan baik yang fisik maupun dukungan manajemen yang dapat lebih membuat penyelenggaraan kegiatan lebih efektif dan efisien.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA AWAL (Tanggal 16 Januari 2024)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yustin Patria Primordia**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua



Iwan Suprijanto
NIP. 19710980 199803 1 001

Pihak Pertama



Yustin Patria Primordia
NIP. 19720626 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SARANAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	3.650 Unit
	3. Jumlah Rumah Swam yang dibangun	161 Unit
	4. Jumlah Rumah Swam yang diperbaiki	3 Tower
	5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	- Unit
	6. Jumlah Rumah Khusus yang diperbaiki	- Unit
	7. Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	900 Unit
	8. Jumlah laporan pertknaan dan pengembangan kepartaian intern dan manajemen risiko	3 Laporan
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi cara kerja kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sorutn dan Protesrta Internal	1 Layanan
	2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan
	3. Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan
Kegiatan		
1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman		Anggaran
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V		Rp 141,453,428,000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan		Rp 3,826,639,000
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung		Rp 67,687,440,000
d. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Bangka Belitung		Rp 29,866,319,000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan		Rp 40,273,030,000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V		Rp 7,390,519,000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan		Rp 3,885,587,000
c. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung		Rp 1,316,500,000
d. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Bangka Belitung		Rp 965,214,000
Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V		Rp 1,193,088,000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan		Rp 7,712,296,000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung		Rp 69,033,940,000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Bangka Belitung		Rp 30,631,693,000
Total		Rp 41,466,088,000
		Rp 148,843,947,000
Jakarta, 16 Januari 2024		
Direktur Jenderal Perumahan		Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V
		
Iwan Suprijanto NIP. 19710980 199803 1 001		Yustin Patria Primordia NIP. 19720626 199703 2 003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

PERJANJIAN KINERJA REVISI I (Tanggal 28 Juni 2024)

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yustin Patria Primordia**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Juni 2024

Pihak Kedua

Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Pihak Pertama

Yustin Patria Primordia
NIP. 19720626 199703 2 003

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan
	2 Jumlah Satuan Standar Pemukiman Kualitas Rumah Swadaya	2.900 Unit
2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	150 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dihutangi	1 Tower
	5 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	- Unit
	6 Jumlah Rumah Khusus yang dihutangi	- Unit
	7 Jumlah Rumah yang menyediakan Satuan PSU	400 Unit
	8 Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	3 Laporan
	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Sotker	4 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan
Revisi:		
1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman		
a. Sotker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Rp	117.274.038.000
b. Sotker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan	Rp	2.309.661.000
c. Sotker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung	Rp	79.164.463.000
d. Sotker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Bangka Belitung	Rp	23.671.644.000
e. Sotker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Riau	Rp	11.628.250.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan		
a. Sotker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Rp	6.453.744.000
b. Sotker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan	Rp	3.504.258.000
c. Sotker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung	Rp	1.144.790.000
d. Sotker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Bangka Belitung	Rp	762.705.000
e. Sotker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Riau	Rp	1.011.951.000
Pagu Sotker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Rp	6.313.979.000
Pagu Sotker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan	Rp	80.309.283.000
Pagu Sotker Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung	Rp	24.464.349.000
Pagu Sotker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Bangka Belitung	Rp	12.640.201.000
Pagu Sotker Penyediaan Perumahan Provinsi Kep. Riau	Rp	1.011.951.000
Total	Rp	123.727.782.000
Anggaran		
Rp 117.274.038.000		
Rp 2.309.661.000		
Rp 79.164.463.000		
Rp 23.671.644.000		
Rp 11.628.250.000		
Rp 6.453.744.000		
Rp 3.504.258.000		
Rp 1.144.790.000		
Rp 762.705.000		
Rp 1.011.951.000		
Rp 6.313.979.000		
Rp 80.309.283.000		
Rp 24.464.349.000		
Rp 12.640.201.000		
Rp 1.011.951.000		
Total Rp 123.727.782.000		
Jakarta, 28 Juni 2024		
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V		
Yustin Patria Primordia		
NIP. 19720626 199703 2 003		
Direktur Jenderal Perumahan		
Iwan Suprijanto		
NIP. 19710930 199803 1 001		

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

PERJANJIAN KINERJA REVISI II (Tanggal 7 Oktober 2024)



REVISI II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yustin Patria Primordia**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua



Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Pihak Pertama



Yustin Patria Primordia
NIP. 19720626 199703 2 003

REVISI II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3. Laporan
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Rustlas Rumah Sederaja	4.960. Unit
	3. Jumlah Rumah Sederaj yang dibangun	150. Unit
	4. Jumlah Rumah Sederaj yang dipelihar	- Tower
	5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	- Unit
	6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihar	- Unit
	7. Jumlah Rumah umum yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	675. Unit
	8. Jumlah laporan pembinaan dan penghargaan kepatuhan norm dan manajemen risiko	3. Laporan
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Layanan
	2. Jumlah Layanan Dilugung Manajemen Seder	4. Layanan
	3. Jumlah Layanan Perkantoran	4. Layanan
Kegeluaran:		
1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman		
a. Seder Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Rp	162.510.725.000
b. Seder Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan	Rp	2.799.305.000
c. Seder Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung	Rp	109.508.909.000
d. Seder Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp	33.842.184.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp	18.360.347.000
a. Seder Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Rp	6.347.016.000
b. Seder Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan	Rp	3.397.570.000
c. Seder Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara	Rp	1.144.790.000
d. Seder Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung	Rp	792.705.000
e. Seder Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp	1.011.501.000
Pagu Seder Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Rp	6.096.875.000
Pagu Seder Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan	Rp	110.553.699.000
Pagu Seder Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung	Rp	34.634.869.000
Pagu Seder Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp	17.372.295.000
TOTAL Rp		168.787.741.000
Jakarta, 7 Oktober 2024		
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V		
Yustin Patria Primordia NIP. 19720626 199703 2 003		
Direktur Jenderal Perumahan		
Iwan Suprijanto NIP. 19710930 199803 1 001		

PERJANJIAN KINERJA REVISI III AKHIR (Tanggal 7 Oktober 2024)

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yustin Patria Primordia**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera V**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Saprijanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

Iwan Saprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Pihak Pertama

Yustin Patria Primordia
NIP. 19720626 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			REVISI AKHIR
SASARAN KEGIATAN	INDUKTOR KINERJA	TARGET	
1. Meningkatkan ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penanganan Pemecatan Perumahan 2. Jumlah Sertifikat Simulasi Perumahan Rumah 3. Jumlah Rumah Sertifikat yang dibangun 4. Jumlah Rumah Sertifikat yang dipelihara 5. Jumlah Rumah Sertifikat yang dibangun 6. Jumlah Rumah Sertifikat yang dipelihara 7. Jumlah Rumah Sertifikat yang mendapat bantuan layanan 8. Jumlah Laporan pemeliharaan dan pengembalian layanan 9. Jumlah Laporan pemeliharaan dan pengembalian layanan	3 Laporan 6.316 Unit 250 Unit 2 Tahun 1 Unit 1 Unit 475 Unit 3 Laporan	
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 3. Jumlah Laporan Pemeliharaan Perumahan 4. Jumlah Laporan Pemeliharaan	1. Jumlah Laporan Pemeliharaan Perumahan 2. Jumlah Laporan Pemeliharaan Perumahan 3. Jumlah Laporan Pemeliharaan Perumahan	1 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	
Anggaran:			Anggaran:
1. Pemeliharaan Akut Perumahan yang layak dan aman			Rp 215.215.450.000
a. Saluran Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera V			Rp 2.152.154.500.000
b. Saluran Perumahan Perumahan Perumahan Sumatera V			Rp 193.238.193.000.000
c. Saluran Perumahan Perumahan Perumahan Sumatera V			Rp 73.052.400.000.000
d. Saluran Perumahan Perumahan Perumahan Sumatera V			Rp 20.571.154.000.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			Rp 6.000.129.000.000
a. Saluran Balai Pelaksanaan Perumahan Perumahan Sumatera V			Rp 3.250.154.000.000
b. Saluran Perumahan Perumahan Perumahan Sumatera V			Rp 1.116.650.000.000
c. Saluran Perumahan Perumahan Perumahan Sumatera V			Rp 100.000.000.000
d. Saluran Perumahan Perumahan Perumahan Sumatera V			Rp 100.000.000.000
Pusat Saluran Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera V			Rp 3.250.154.000.000
Pusat Saluran Perumahan Perumahan Perumahan Sumatera V			Rp 100.000.000.000
Pusat Saluran Perumahan Perumahan Perumahan Sumatera V			Rp 100.000.000.000
Pusat Saluran Perumahan Perumahan Perumahan Sumatera V			Rp 100.000.000.000
Total			Rp 215.215.450.000
Jakarta, 31 Desember 2024			
Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera V			
Yustin Patria Primordia			
NIP. 19720626 199703 2 003			

LAMPIRAN 2

Bukti Dukung Capaian Kinerja

**PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TAHAP 1

Perumahan Sako Park Residence II, Kota Palembang (81 Unit)



Perumahan Griya Curup Embun I Tahap I dan II, Kota Pagar Alam (70 Unit)



Perumahan Samesta Green View Cluster Orchid, Kabupaten Banyuasin (176 Unit)



TAHAP 2

Perumahan MBR di Perumahan Atas Prakarsa dan Upaya Kelompok MBR Pemulung Kota Prabumulih (70 Unit)



**PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR
PROVINSI LAMPUNG**

TAHAP 1

Perumahan Griya Sukanegara, Kabupaten Lampung Selatan (84 Unit)



**PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN UNTUK PERUMAHAN MBR
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

TAHAP 1

Perumahan Kebun Jeruk Residence, Kabupaten Belitung (114 Unit)



Perumahan Gading Permai 2, Kabupaten Bangka Selatan (80 Unit)



**BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jumlah Penerima Bantuan 4.776 Unit

0%

Fatahilah - Sungai Pinang, OKI



30%



100%



Dedi Irawan - Sungai Pinang, OKI



Zainal Abidin - Kandis, OKI



Zainap - Sikap Dalam, Empat Lawang



Rizal Mukti - Lintang Kanan, Empat Lawang



**BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PROVINSI LAMPUNG**

Jumlah Penerima Bantuan 3.015 Unit

0%

30%

100%

Yunus Arista - Bunga Mayang, Lampung Utara



0%

30%

100%

Siswanto - Abung Timur, Lampung Utara



0%

30%

100%

Dimas Raket S - Abung Semuli, Lampung Utara



0%

30%

100%

Muhamad Taufik - Kotabumi Utara, Lampung Utara



0%

30%

100%

Sarinah - Abung Tengah, Lampung Utara



**BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

Jumlah Penerima Bantuan 487 Unit

0%

30%

100%

Rintan Sari - Namang, Bangka Tengah



Agus Kuato - Lubuk Besar, Bangka Tengah



Reni - Jebus, Bangka Barat



Aini Sajim - Jebus, Bangka Barat



./

Supian - Air Bulin, Bangka Barat



PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pembangunan Rumah Susun MYC 2023-2024

Pembangunan Rumah Susun Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Rumah Susun Mahasiswa dengan Jumlah 43 Unit



Pembangunan Rumah Susun MYC 2023-2024

Pembangunan Rumah Susun Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Rumah Susun Mahasiswa dengan Jumlah 43 Unit



PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PROVINSI LAMPUNG

Pembangunan Rumah Susun MYC 2023-2024

Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Hidayatusholihin Yayasan Abdul Ghoni, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
Rumah Susun Santri Pondok Pesantren dengan Jumlah 32 Unit



PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

Pembangunan Rumah Susun MYC 2023-2024

Pembangunan Rumah Susun Yayasan Arroyan Qiyammu Lail, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung

Rumah Susun Santri Pondok Pesantren dengan Jumlah 32 Unit



PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pemeliharaan Rumah Susun

Rumah Susun Universitas Bina Darma, Kabupaten Banyuasin



Pemeliharaan Rumah Susun

Rumah Susun ASN PUPR, Kabupaten Banyuasin



PEMBANGUNAN RUMAH INTI TUMBUH TAHAN GEMPA (RITTA) KOTA PRABUMULIH



LAMPIRAN 3

Penghargaan

Penghargaan dari KPPN kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V sebagai Peringkat Tiga Kategori Pagu Besar Penilaian Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Teraktif yang diberikan pada tanggal 30 Januari 2024



LAMPIRAN 4

Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V

Jalan Jenderal Sudirman / Inspektur Yazid Nomor 7490 KM 2,5 Kota Palembang email: bp2psu.sumatrav@gmail.com

BERITA ACARA KESEPAKATAN
CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2024
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V

Hai : Finalisasi Capaian Output Tahun 2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V
Hari/Tanggal : 31 Desember 2024
Pihak Pertama : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V
Pihak Kedua : Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan laporan capaian pelaksanaan kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2024, maka Capaian Output Tahun 2024 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024:

NO	SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Unit)	REALISASI (Unit)	CAPAIAN KINERJA
1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni				
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	8.318 Unit	8.278 Unit	99,52%
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	150 Unit	150 Unit	100,00%
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	2 Tower	2 Tower	100,00%
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-
7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	675 Unit	675 Unit	100,00%
8.	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	3 Laporan	3 Laporan	100,00%
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan				
1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
2.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	4 Layanan	100,00%
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan	100,00%

2. Capaian Kinerja dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024:

NO	SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V				
1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni				
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
2.	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	3 Laporan	3 Laporan	100,00%
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan				
1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
2.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN				
1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni				
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	-	-	-
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	4.787 Unit	4.776 Unit	99,77%
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	86 Unit	86 Unit	100,00%
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	2 Tower	2 Tower	100,00%
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-
7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	397 Unit	397 Unit	100,00%

NO	SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN				
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan			
1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
2.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI LAMPUNG				
1.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni			
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	3.044 Unit	3.015 Unit	99,05%
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	32 Unit	32 Unit	100,00%
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	-	-	-
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-
7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	84 Unit	84 Unit	100,00%
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan			
1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
2.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG				
1.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni			
1.	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	-	-	-
2.	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	487 Unit	487 Unit	100,00%
3.	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	32 Unit	32 Unit	100,00%
4.	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	-	-	-
5.	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-
6.	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	-	-	-
7.	Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	194 Unit	194 Unit	100,00%
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan			
1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
2.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%

Demikian Capaian Output Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024 telah dibuat berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, sehingga Berita Acara Kesepakatan ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024.

Palembang, 31 Desember 2024

Disetujui oleh;

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

Yustin Patria Primordia

Kepala Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan
Provinsi Sumatera Selatan


Manda Machyus

Kepala Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan
Provinsi Lampung


Heriyanto

Kepala Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan
Provinsi Kep. Bangka Belitung


Andl

LAMPIRAN 5

Dokumentasi Kegiatan

SINKRONISASI DAN KOORDINASI PROGRAM PUSAT-DAERAH

- Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PKP dan Sinkronisasi Program Perumahan
Palembang, 16-17 Mei 2024



- Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PKP dan Sinkronisasi Program Perumahan Provinsi Lampung
Bandar Lampung, 5-7 Juni 2024



- Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PKP dan Finalisasi Usulan Program Perumahan
Palembang, 18-19 Oktober 2024



PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP

- Rapat Koordinasi Akhir Penyusunan Dokumen RP3KP Kota Palembang
Palembang, 20 Desember 2024



MONITORING DAN EVALUASI

PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sumatera Selatan



- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Pembangunan PSU Rumah Umum Provinsi Sumatera Selatan



- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Susun Provinsi Sumatera Selatan



- Kunjungan Lapangan Lokasi Pembangunan RITTA Prabumulih
Prabumulih, 10 Januari 2024



- Kunjungan ke Rusun Samesta Jakabaring dan Perumahan Orchid Green View Perumnas Palembang dan Banyuasin, 11 Januari 2024



- Pendampingan Evaluasi atas Pembangunan Perumahan oleh BPKP di Kabupaten OKI Tahun 2024 OKI, 21-22 Mei 2024



PROVINSI LAMPUNG

- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Lampung



- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Susun Provinsi Lampung



PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Kep. Bangka Belitung



- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Susun Provinsi Kep. Bangka Belitung



PEENDAMPINGAN MANAJEMEN RISIKO (MR)

- Pelatihan *Certified Risk Officer in Public Sector (CROP)* Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

Jakarta, 29 Juli 2024 - 2 Agustus 2024



PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

- Konsinyasi Penilaian Akhir Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024
Jakarta, 13-15 Maret 2024



PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

- Audit Surveillance Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) Balai P2P Sumatera V
Pelambang, 12-13 Agustus 2024



VERIFIKASI BANTUAN PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN BAGI MBR TA 2025, FASILITASI SERAH TERIMA ASET SERTA KOORDINASI PENDATAAN PSR

- Verifikasi Teknis Bantuan Pembangunan PSU Rumah Umum Provinsi Sumatera Selatan



- Verifikasi Teknis Bantuan Pembangunan PSU Rumah Umum Provinsi Sumatera Selatan



- Verifikasi Teknis Bantuan Pembangunan PSU Rumah Umum Provinsi Lampung



- Verifikasi Teknis Bantuan Pembangunan PSU Rumah Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung



VERIFIKASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DAN FASILITASI KRS

- Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sumatera Selatan



- Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Lampung

- Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Kep. Bangka Belitung



- Fasilitasi Klinik Rumah Swadaya (KRS)



VERIFIKASI LOKASI BANTUAN RUMAH SUSUN DAN PERENCANAAN PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN

- Advice Teknis pada Kegiatan Pemeliharaan Rusun Pekerja Kota Palembang
Palembang, 13-15 Mei 2024



- Verifikasi Lokasi Bantuan Pembangunan Rumah Susun di Provinsi Sumatera Selatan



- Verifikasi Lokasi Bantuan Pembangunan Rumah Susun di Provinsi Lampung



- Verifikasi Lokasi Bantuan Pembangunan Rumah Susun di Provinsi Kep. Bangka Belitung



